

**TINDAKAN HUKUM DALAM PENYELAMATAN DAN  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ( *NON  
PERFORMING LOAN* ) OLEH BANK RAKYAT  
INDONESIA CABANG TEMANGGUNG  
TAHUN 2002 – 2006**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

**Minat Utama : Hukum Bisnis**



**OLEH :**

**S A R T O N O**  
**NIM : S. 320905013**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
S U R A K A R T A  
2008**

**TINDAKAN HUKUM DALAM PENYELAMATAN DAN  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ( *NON  
PERFORMING LOAN* ) OLEH BANK RAKYAT  
INDONESIA CABANG TEMANGGUNG  
TAHUN 2002 – 2006**

**DISUSUN OLEH :**

**S A R T O N O  
NIM : S. 320905013**

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono,SH. MH</u> NIP. 131 793 333	.....	.....
2. Pembimbing II	<u>Agus Rianto,SH. M.Hum</u> NIP. 131 842 682	.....	.....

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 345 735**

**TINDAKAN HUKUM DALAM PENYELAMATAN DAN  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ( *NON  
PERFORMING LOAN* ) OLEH BANK RAKYAT  
INDONESIA CABANG TEMANGGUNG  
TAHUN 2002 – 2006**

**DISUSUN OLEH :**

**S A R T O N O  
NIM : S. 320905013**

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.	.....	.....
Sekretaris	Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.	.....	.....
Anggota	1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH.	.....	.....
	2. Agus Riyanto, SH., M.Hum.	.....	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Prof. Dr. H. Setiono, S.H., MS. NIP. 130 345 735	.....	.....
Direktur Program Pascasarjana	Prof. Drs. Suranto, MSc., Ph.D NIP. 131 472 192	.....	.....

## PERNYATAAN

Nama : **SARTONO**

NIM : **S. 320905013**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :  
**“ Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ) Oleh Bank Rakyat Inidonesia Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Oktober 2008

Yang membuat pernyataan,

**SARTONO**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :“ **Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ) Oleh Bank Rakyat Inidonesia Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006 “**

Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Drs. Haris Mudjiman MA. PhD., selaku mantan Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Prof. Dr. H.Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang banyak memotivasi penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
4. Ibu Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dan dorongan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar.
5. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Agus Rianto, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Bapak / Ibu Tim Penguji Tesis Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
8. Kedua Orang Tua yang telah mendidik dan membesarkan dan merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis.
9. Istri dan anak-anak penulis tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan moril serta do'a yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan Studi S2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2005, khususnya Konsentrasi Hukum Bisnis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.

Amin.

Surakarta, Oktober 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II    LANDASAN TEORI .....	6
A. Kajian Teori .....	6
1. Jenis-jenis dan Pengertian Bank .....	6
2. Perkreditan .....	9
3. Perjanjian Kredit Bank .....	25
4. Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-lembaga Hukum .....	31
5. Teori Bekerjanya Hukum .....	42
B. Kerangka Berpikir .....	48
BAB III   METODE PENELITIAN .....	51
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Responden .....	54
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Teknik Analisa Data .....	57

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A.	Hasil Penelitian .....	60
B.	Pembahasan .....	65
1.	Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Kredit Macet di BRI Cabang Temanggung .....	65
2.	Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh BRI Cabang Temanggung Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Sesuai Dengan SE BI Nomor 26/4/BPPP dan PP Nomor 33 / 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah .....	72
BAB V	PENUTUP .....	84
A.	Kesimpulan .....	84
B.	Implikasi .....	87
C.	Saran .....	88
	DAFTAR PUSTAKA .....	89
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

**Sartono, S. 320905013. 2008. Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ) Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006.**

Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet ( *non performing loan* ) yang terjadi di BRI Cabang Temanggung, dan bentuk-bentuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung pada Tahun 2002 – 2006.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah empiris / *non-doktrinal*, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke 5 yaitu manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik. Analisa data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet / *non performing loan* BRI Cabang Temanggung Pada Tahun 2002 – 2006 adalah sebagai berikut : (1) penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya; (2) nasabah kurang mampu mengelola usahanya; (3) nasabah beritikad tidak baik; (4) adanya kebijakan pemerintah dalam sektor riil. Adapun tindakan penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung dalam mengatasi kredit macet / *non performing loan* antara lain dengan cara : (1) Penurunan suku bunga kredit; (2) pengurangan / penghapusan tunggakan; (3) Pengurangan tunggakan pokok kredit; (4) Perpanjangan jangka waktu Kredit; ( 5 ) Pengambil alihan agunan / aset debitur; (6) Penjualan Barang Jaminan dibawah tangan; (7) penyerahan piutang ke BUPLN / PUPN; dan (8) Mengajukan gugatan melalui PN.

Implikasi yang timbul dari hasil kesimpulan bahwa dengan banyaknya kredit macet menyebabkan turunnya likuiditas bank itu sendiri, sehingga akhirnya mempengaruhi program pemerintah dalam percepatan penyaluran kredit. Adapun saran / rekomendasi yang diajukan antara lain diperlukan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit, dihindarkan adanya kesalahan penghitungan antara nilai jaminan dengan nilai pinjaman dan meningkatkan sumber daya manusia dalam manajemen Bank mengingat besarnya kredit yang disalurkan dimasa mendatang.

## ABSTRACT

**Sartono, S. 320905013, 2008, Law Action in Saving and Solving Non Performing Loan by BRI Temanggung Branch in 2002 – 2006.**

Thesis : Magister Program University of Sebelas Maret Surakarta.

This research has aimed to know and analyze the factors causes non performing loan occurs in BRI Temanggung Branch and various kinds of solution credit stuck handled by BRI Temanggung Branch in 2002 – 2006.

Type of this research uses empiric / non-doctrinal based on the fifth legal concep in which law is a manifestation of symbolic meaning of social behaviors, which are shown in their interaction. This research uses diagnostic type the data analyzes by qualitative analysis.

Based on the tresearch and ciscussion by using law action theory, therefore it concluded that various factors cause non performing loan in BRI Temanggung Branch in 2002 – 2006 consist of : (1) inappropriate of spending credit with the purpose before; (2) customers less capable to manage their business; (3) customer has no good faith; (4) government policy in the real sector. However the action to save and solve these matters done by BRI Temanggung Branch in handling credit stuck / non performing loan as follows : (1) decrease credit rate of interest; (2) decrease remove arrears; (3) decrease main arrears of credit; (4) time lengthening of credit; (5) expropriation assets; (6) sell out illegally guarantee material; (7) receiable what overflows to BUPLN / PUPN; and (8) proposed using thought PN.

Implication from the conclusion resulting that the more non performing loan causes decreasing of banking liquadity itself, finally it influences in acceleration credit distribution as government program. Suggestion or recommendation proposed for instance is needed carefulness principle in credit distribution process, avoid calculation error between value of guarantee and value of credit and developing human resources in the banking management, it considering that credit value distribution in the future.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.**

##### **atar Belakang Masalah**

Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini, maka salah satu sumber dana Perbankan adalah penyaluran dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha. yang diperuntukan kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksi usahanya. Bank terutama dalam pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee base income*. Adapun sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat tersebut bukanlah dana milik Bank sendiri, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank dalam bentuk tabungan, Deposito, Giro, Sertifikat Deposito, dan lain-lain, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman / kredit.

Oleh karena sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pinjaman merupakan dana-dana masyarakat, maka dalam penyalurannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang ketat dan tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar pinjaman / kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Promosi yang dilakukan oleh bank dalam meraup pangsa pasar dengan menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit, baik bagi modal kerja, investasi atau bersifat konsumtif. Di sini bank berperan dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi.

Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam

produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam operasional sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara, bank dengan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan antara debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit.

Disatu sisi kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan Bank yang terbesar, di sisi lain kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama Bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu tidak berlebihan jika stabilitas usaha Bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mengelola kredit. Bank yang berhasil mengelola kreditnya diprediksikan akan berkembang usahanya. Kondisi Bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah pasti akan mundur usahanya. Kemunduran usaha perbankan karena kerugian yang didatangkan dari kerugian kredit ini akan lebih besar dibandingkan kerugian yang didatangkan dari jenis usaha lainnya, karena jumlah dana yang ditanam dalam jenis kegiatan lain ini biasanya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah dana yang ditanam dalam jenis kegiatan kredit.

Sejauh ini perkembangan bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian ( *prudential banking* ) dengan sasaran mencapai volume kredit yang tinggi untuk mendapatkan profit semata. Sasaran yang dicapai adalah meraup pangsa pasar sebesar mungkin dengan mengadakan persaingan usaha yang sehat.

Akan tetapi kredit / pinjaman yang diberikan tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena tidak sedikit kredit menjadi masalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi, adanya kesengajaan

debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit sehingga menyebabkan sumber pendapatan dari usaha tersebut tidak mencukupi bahkan gagal.

Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pasti mengalami permasalahan mengenai kredit macet dan hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang baru bagi dunia perbankan. Permasalahan kredit macet yang dihadapi oleh pihak bank, banyak disebabkan oleh lemahnya kemampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya serta tidak selektifnya petugas bank dalam memberikan kredit. Dari segi debitur banyaknya permasalahan-permasalahan intern yang dihadapi oleh debitur, menyebabkan debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet. Hal ini biasanya berkaitan dengan usahanya yang macet, terkena dampak krisis ekonomi atau hal lain yang menyebabkan debitur kesulitan keuangan. Dari sisi petugas bank, tidak selektifnya dalam studi kelayakan dalam pemberian kredit, sehingga banyak debitur yang tidak layak diberikan kredit mendapatkan kredit sehingga terjadinya kredit macet.

Sebagai contoh, Bank BRI Kantor Cabang Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pinjaman kepada masyarakat Temanggung mengalami kredit yang bermasalah. Menurut data yang diperoleh, tercatat kondisi kredit yang bermasalah ( *Non Performing Loan* ) yang terjadi selama tahun 2002 berjumlah 17 kredit macet dengan total NPL sebesar Rp. 1.504.020.000,-, pada Tahun 2003 berjumlah 17 kredit macet dengan total NPL sebesar Rp. 1.593.728.000,-, Tahun 2004 sejumlah 4 kredit macet dengan total NPL sebesar Rp. 198.875.000,- dan Tahun 2005 sebanyak 6 kredit macet dengan total NPL sebesar Rp. 1.178.395.000,- dan Tahun 2006 sebanyak 9 kredit macet dengan total NPL sebesar Rp. 3.308.042.000,- ( sumber laporan Kolektibilitas Pinjaman BRI Temanggung Tahun 2007 ).

Hal inilah yang cukup menarik, karena meskipun tergolong kota yang relatif kecil dengan masyarakat yang berprofesi petani, dan wiraswasta, akan tetapi Bank BRI Cabang Temanggung berani memberikan kucuran dana untuk plafon kredit yang cukup besar jumlahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul : “ ***Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ( Non Performing Loan ) Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006*** “ .

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, tampak jelas bahwa dalam penulisan tesis ini, penulis akan mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah / kredit macet ( *non performing loan* ) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung pada Tahun 2002 – 2006 ?
2. Apa bentuk-bentuk Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet yang dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung dengan berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan tersebut menyangkut dua hal, yaitu bersifat obyektif dan subyektif.

1.

ujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet / bermasalah ( *non performing loan* ) di BRI Cabang Temanggung.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelamatan dan penyelesaian Kredit Macet yang dilakukan Oleh BRI Cabang Temanggung.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan obyek penelitian, guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Magister ( S2 ) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya hukum pihak bank dalam mengatasi kredit macet, sehingga manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan. upaya-upaya / kebijakan penyelesaian kredit macet yang terjadi dalam perusahaan perbankan khususnya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan para, pengusaha perbankan guna mengambil langkah-langkah kebijakan secara optimal dalam upaya menyelesaikan kredit macet yang terjadi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1.**

##### **enis-jenis dan Pengertian Bank**

###### **a. Jenis-jenis Bank**

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikenal 2 ( dua ) jenis bank sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu :

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat

Pembagian jenis bank menurut UU tersebut hanya didasarkan dari segi fungsi bank, juga untuk memperjelas ruang lingkup dan batas-batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah dikenal banyak lembaga-lembaga yang melakukan usaha perkreditan, seperti Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Desa dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut pada waktu itu sudah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

Lembaga-lembaga tersebut mempunyai 2 (dua) ciri, yaitu ( Djumhana, 1996 : 131 ) :

- 1) Kebersamaan dengan sifat kooperatif;
- 2) Ciri ekonomi berupa lembaga usaha keuangan sederhana yang legal dengan administrasi yang jelas.

Bank Perkreditan Rakyat dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum. Persyaratan, BPR tersebut harus memiliki tingkat kesehatan dan permodalan yang selama 12 bulan terakhir, atau sekurang-kurangnya 10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya tergolong cukup sehat. BPR tersebut juga harus memenuhi persyaratan modal disetor untuk menjadi Bank Umum, dan memenuhi ketentuan dan dewan komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan pada Bank Umum.

###### **b. Pengertian Bank**



Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998, Bank diartikan sebagai “ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga pelayanan masyarakat ( *fiduciary financial institution* ), yang mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat ( Pramono, 1999 : 2 ).

Ditinjau dari sudut perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, kenyataan di masyarakat, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai apa yang disebut dengan bank. Ada tiga cara jalan untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan bank ( Macey dan Miller dalam Pramono, 1999 : 36 - 37 ) :

- 1) Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ( *legal regulation within which the institutional function* ).
- 2) Mengacu kepada service bank mengenai apa yang ditawarkan kepada konsumen.
- 3) Mengacu kepada fungsi ekonomis ( *economic function* ) dari bank seperti yang ditunjukkan dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Dari sudut legal, ( kalau di Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 1998 ) yang disebut Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sudut *legal*, banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tapi tidak disebut bank. Mengacu pada produk yang ditawarkan kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dari sudut ini banyak lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga ekonomi, tapi tidak disebut bank, misalnya : *mortgage companies, pension funds, money market mutual funds, life insurance companies*, juga

menawarkan pinjaman, tapi ia tidak disebut bank. Mengacu kepada fungsi ekonomis bank, maka didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai *financial intermediary* atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen.

Dari ketiga definisi seperti dikemukakan di atas, ternyata pendekatan dari fungsi ekonomis yang dianggap paling memuaskan. Sebagai *financial intermediaries*, bank akan mengambil uang dari investor, kemudian mengumpulkannya dan menanamkannya kembali dana tersebut pada perusahaan lain, seperti misalnya : dalam bentuk kredit, saham, pasar modal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bank biasa disebut sebagai institusi yang berada di antara investor dengan investasi yang paling akhir ( Macey dan Miller dalam Pramono, 1999 : 38 ). Seperti yang diketahui, fungsi pokok bank adalah menyalurkan tabungan menjadi investasi dengan cara menempatkan dirinya di antara penabung dan investor.

Pengertian Bank Umum sebagai mana tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu :

“ Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ”.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

“ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ”.

## **2. Perkreditan**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere*, yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit ( kreditur ) percaya bahwa penerimaan kredit ( debitur ) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya.

Pengertian kredit menurut Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah :

*" The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and rehabilitee". ( Henry Black Campbell, 1990 : 367 ).*

Pengertian menurut kamus umum hukum ekonomi adalah : kecakapan atau kelayakan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “.

Pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas menurut UU No. 10 Tahun 1998 mengalami sedikit perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kreditur yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka tujuan kredit adalah memperoleh keuntungan.

Pokok usaha bank adalah pemberian kredit. Karena itu kebijaksanaan dalam pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah hal yang esensial untuk memperkecil resiko. Dapat dikatakan pemberian kredit adalah penghasilan terbesar bank

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya ( Hasan, 1999 : 12 ).

Kredit diartikan sebagai pemberian prestasi ( berupa uang atau barang ) dengan balas prestasi ( kontra prestasi ) yang akan terjadi pada waktu tertentu dengan pemberian bunga, dengan demikian pengertian kredit adalah : adanya unsur kepercayaan dan unsur mempunyai sifat atau pertimbangan tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan bagi debitur adalah, adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja, antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan adanya resiko yang berupa ketidak-tentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut ( Untung, 2000 : 76 ).

Dari uraian tersebut di atas, terdapat adanya beberapa unsur dalam pemberian kredit yang timbul akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, menyebabkan semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Hal ini disebabkan karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, akan masih selalu terdapat unsur ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini, maka timbullah alasan-alasan atau pertimbangan dalam pemberian kredit, yaitu :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari pada uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- 4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang saja, namun dapat dalam bentuk barang atau jasa.

Oleh karena itu dalam pemberian kredit selain unsur keoercayaan, maka dalam permohonan dan pemberia kredit juga mengandung unsur-unsur lain yaitu unsur waktu, unsur resiko dan unsur prestasi. Dalam pemberian kredit unsur waktu yang dimaksudkan merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur.

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, bahwa yang dimaksud resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu membawa konsekuensi mengandung resiko usaha bagi bank. Resiko disini adaah resiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena suatu al tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit maka makin besar juga resiko bagi bank.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu dan biasanya dicantumkan sebagaimana nama atau fasilitas itu diberikan, misalnya kredit ekspor, kredit investasi, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan sebagainya. Di sisi lainnya tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit ( Suyatno, 1990 : 15 ) adalah :

- 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit hasilnya berupa keuntungan. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh fasilitas kredit akan bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup bank.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit berikutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana tersebut digunakan untuk investasi ataupun modal kerja. Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan pemerintah dengan penyebaran pemberian kredit (Kasmir, 2000 : 95 ) adalah :

- a) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank;
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menarik tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- d) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, hal ini jelas akan menghemat devisa negara;
- e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai digunakan untuk keperluan ekspor.

Kredit selalu bertujuan, karena tidak mungkin kreditur memberikan kredit tanpa tujuan dan dapat dipergunakan apa saja oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat merugikan kepentingan bank itu sendiri. Umumnya bank akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit yang diberikan kepada debitur, akan tetapi dalam praktik perbankan hal tersebut sering diabaikan berhubung bank lebih mementingkan pertumbuhan kredit untuk meningkatkan portofolionya ( Johannes Ibrahim, 2004 : 13-14 ).

Sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau keuntungan.

Dari rumusan itu dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan :

“ Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembangkan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ”.

Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu bahwa objeknya adalah benda yang habis pakai, termasuk uang. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu, namun demikian, pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan mempergunakan bentuk perjanjian baku ( *standar contract* ). Perjanjian baku yang banyak dianut oleh bank-bank ini sebenarnya sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum sempat mendapatkan perhatian pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Masalah yang muncul dengan adanya perjanjian ini ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Kelemahan dari perjanjian baku ini jelas tampak dari adanya perjanjian kredit yang disusun secara sepihak oleh perbankan adalah tidak logis, karena kepentingan debitur tidak dilindungi dalam perjanjian itu, sebab debitur tidak mempunyai hak untuk mengubah atau memodifikasi perjanjian baku tersebut. Perjanjian demikian dapat disebut sebagai perjanjian paksaan atau *all size contract* atau *take it or leave it contract* ( Muhammad, 2002 : 8 ).

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada perusahaan yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat yang akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK ), bank tidak

diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham ( Muhammad Djumhana, 1996 : 246 ).

Guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting diperhatikan oleh bank. Ketentuan adanya jaminan inilah yang penting oleh bank. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan :

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ”.

Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari bebitur atau, lazim dikenal dengan penilaian kriteria 5C calon debitur. Kriteria 5C yang dimaksud adalah *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* ( Sutojo, 1997 : 3 )

*Character* dapat diartikan sebagai kepribadian, watak. Dalam hal ini pihak bank harus benar-benar memperhatikan dan memberi penilaian apakah calon debitur yang baru tersebut mempunyai kepribadian yang baik, sehingga diperkirakan akan sanggup untuk memenuhi kewajiban berupa pelunasan atas kredit yang diminta atau dimohonkannya kepada bank.

*Capacity* dapat diartikan dengan kemampuan, kesanggupan, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

Kemampuan dari calon nasabah dapat dilihat dari :

- 1) Pengetahuannya. tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan.
- 2) Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.



- 3) Kekuatan perusahaan pada saat calon debitur meminta fasilitas kredit kepada bank, yang berhubungan langsung dengan sektor usaha yang sedang dijalankannya.

Adapun yang dimaksud adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

Penilaian *capital* / modal usaha ini dapat dilihat dari :

- 1) Apakah perusahaan calon debitur tersebut telah mempunyai cukup modal ?
- 2) Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon debitur ?
- 3) Bagaimana *liquiditas*, *solvabilitas* dan *rentabilitas* dari perusahaannya ?

*Collateral* dapat diartikan dengan jaminan. Adapun yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Dengan adanya jaminan ini, maka bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada calon debitur dapat diterima kembali pada suatu saat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan benda jaminan tersebut, maka ada hal-hal yang perlu diteliti oleh bank yaitu :

- 1) Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
- 2) Atas benda jaminan tersebut apakah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman yang lain.
- 3) Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.

*Condition*, ini berhubungan dengan perjanjian permohonan kredit bank, meliputi kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur dan kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon debitur itu berada.

Dalam menilai faktor kondisi ekonomi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) Kedudukan usaha calon debitur dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- 2) Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- 3) Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha dari calon debitur.

Meskipun demikian UU Perbankan Tahun 1998 mengatur mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, dalam arti jaminan tidak mutlak harus ada,

pada setiap pemberian kredit, hanya saja tetap dipentingkan adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Adapun jaminan yang ideal ( baik ) terlihat dari ( Soebekti, 1986 : 29 ) :

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- 2) Tidak melemahkan potensi ( kekuatan ) si penerima kredit untuk melakukan ( meneruskan ) usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Adapun jenis-jenis jaminan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan dalam ( Wardoyo, 1992 : 41 ) yaitu:

- 1) Jaminan perorangan, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban di debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Jenis jaminan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.
- 2) Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik milik debitur sendiri atau milik pihak ketiga, yang secara suka rela diserahkan sebagai jaminan atas utang debitur.

Praktek jaminan pada perbankan Indonesia yang sering dipakai adalah jaminan kebendaan ( Djumhana, 2006 : 249 ) yang meliputi :

- 1) Hak Tanggungan untuk jaminan kebendaan yang berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

- 2) Fidusia untuk jaminan kebendaan yang berupa benda bergerak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT disebutkan pengertian dari Hak Tanggungan, adapun yang dimaksud dengan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selanjutnya disebut Hak Tanggungan sebagai berikut ( Pasal 1 ayat (1) UUHT ) :

“ Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain “.

Dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut, yaitu :

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang;
- b. Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA;
- c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya ( hak atas tanah ) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
- e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Adapun ciri-ciri Hak Tanggungan adalah : (1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegangnya. (2) Selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek Hak Tanggungan itu berada. (3) Memenuhi asas spesialisasi dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Ada beberapa asas dari Hak Tanggungan yang perlu dipahami betul yang membedakan Hak Tanggungan ini dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang yang lain. Bahkan yang membedakannya dari Hipotik yang digantikannya. Asas-asas tersebut tersebar dan diatur dalam

berbagai Pasal dari UUHT. Asas-asas dari Hak Tanggungan ini seperti yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini ( dalam Sutarno, 2005 : 161 ) meliputi :

- 1) Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan.
- 2) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.
- 3) Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada.
- 4) Hak Tanggungan selain dapat dibebankan pada hak atas tanahnya juga berikutan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut.
- 5) Hak Tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari.
- 6) Perjanjian Hak tanggungan adalah perjanjian *accessoir*.
- 7) Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan datang.
- 8) Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang.
- 9) Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tanggungan itu berada.
- 10) Di atas Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh Pengadilan.
- 11) Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu.
- 12) Hak Tanggungan wajib didaftarkan.
- 13) Obyek Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh Pemegang Hak Tanggungan bila debitur cidera janji.
- 14) Pelaksanaan eksekusi hak Tanggungan mudah dan pasti.

Yang dimaksud dengan subyek dalam hal ini adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan.

- 1) Pemberi Hak Tanggungan : dalam Pasal 8 UUHT disebutkan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Pasal 8 UUHT menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dengan demikian, karena obyek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UUHT itu yang menjadi pemberi Hak Tanggungan adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara. Bagi mereka yang akan menerima Hak Tanggungan haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUHT yang menentukan, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UUHT tersebut di atas harus ada atau harus telah ada dan masih ada, pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarkan Hak Tanggungan tersebut. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada, telah ada dan masih ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) UUHT, untuk itu harus dibuktikan keabsahan dari kewenangan tersebut pada saat didaftarkan Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal pemberi Hak Tanggungan adalah suatu persoalan terbatas, pelaksanaannya haruslah memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) undang-undang tersebut, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 88 ayat (4) undang-undang tersebut, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan itu, diumumkan dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

- 2) Pemegang Hak Tanggungan : dalam Pasal 9 UUHT dinyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Menurut Pasal 9 UUHT, pemegang Hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dengan demikian, yang dapat menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, yaitu baik itu orang perseorangan Warga Negara Indonesia maupun orang asing.

Mengenai obyek Hak Tanggungan, diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 27 UUHT. Adapun obyek Hak tanggungan yang dapat membebani hak jaminan atas tanah adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) :
  - (1) Hak Milik
  - (2) Hak Guna Usaha
  - (3) Hak Guna Bangunan
2. Pasal 4 ayat (2) : Hak Pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
3. Pasal 27 yaitu :
  - (1) Rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang diberikan oleh negara.
  - (2) Hak Milik atas satuan rumah susun, yang bangunannya berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR serta SEBI No. SE 23/12/BPPP bertanggal 28 Februari 1991 tentang penggolongan kolektibilitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva. Dari sudut kolektibilitas yaitu keadaan pembayaran pokok ( angsuran pokok ), dan pembayaran bunga kredit oleh nasabah, maka keadaan kredit yang diberikan oleh bank dapat digolongkan ke dalam beberapa keadaan, yaitu :

- 1) Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan. Hanya saja dalam kondisi tertentu dan jenis kredit tertentu dapat ditolerir adanya tunggakan yang minim, misalnya pada jenis kredit:
  - a) Kredit dengan angsuran, di luar Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) kondisinya sebagai berikut :

- (1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan, atau
  - (2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan :
    - (a) belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
    - (b) belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
    - (c) belum melampaui 6 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 4 bulanan, atau
  - (3) Terdapat tunggakan tetapi :
    - (a) belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
    - (b) belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan, atau
  - (4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b) Kredit dengan angsuran untuk KPR.
- (1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
  - (2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- c) Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran.
- (1) Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau
  - (2) Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
  - (3) Kredit telah jatuh waktu, dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknik belum dapat diperpanjang, atau
  - (4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d) Untuk kredit yang diselamatkan.
- Memenuhi ketentuan tersebut pada butir a dan b dan selama satu tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok, dan atau bunga tidak ada tunggakan.
- e) Cerukan rekening giro.

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2) Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

a) Kredit dengan angsuran di luar KPR.

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan :

(a) melampaui 1 bulan, dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau

(b) melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau

(c) melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya 6 bulanan atau lebih, atau

(2) Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau

(3) Terdapat tunggakan bunga yang :

(a) melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau

(b) melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

b) Kredit dengan angsuran untuk KPR.

Terdapat tunggakan angsuran pokok, yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

c) Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran.

(1) Kredit belum jatuh waktu.

(a) terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau

(b) terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau

(2) Kredit telah jatuh waktu, dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau

(3) Ada cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

- d) Kredit yang diselamatkan.
  - (1) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada butir d ( kredit lancar ) dan tidak ada tunggakan, atau
  - (2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir c, atau
  - (3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, dan belum melampaui 30 hari kerja.
- 3) Kredit Diragukan, yaitu apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :
  - a) Kredit masih dapat diselamatkan, dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur, atau
  - b) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang debitur.
- 4) Kredit Macet, yaitu apabila :
  - a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
  - b) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
  - c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara ( BUPN ) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

### **3. Perjanjian Kredit Bank**

Tentang bagaimana hakekat dari perjanjian kredit, jika dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara yuridis perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 ( dua ) segi pandang sebagai berikut ( Munir Fuady, 2002 : 117 ) :

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.
  - b. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.
- Penggolongan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama dalam tampilannya sebagai perjanjian pinjam pakai, maka di samping terhadapnya berlaku ketentuan umum tentang perjanjian, berlaku pada ketentuan KUHPerdata tentang perjanjian pinjam pakai habis.hal ini berbeda dengan perjanjian pinjam pakai biasa, dimana yang harus dikembalikan oleh debiturnya adalah fisik dari benda yang dipinjam, misalnya pinjam mobil, maka yang dikembalikan adalah mobil yang dipakai



tersebut. Sementara dalam perjanjian pinjam pakai habis, yang dikembalikan adalah nilai dari benda yang dipinjam pakai tersebut.

Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUHPerdara yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan.

Undang-undang Perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, untuk mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku ( *standards contract* ). Perjanjian kredit bank bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasiandan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang menyimpan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya ( Rachmadi Usman, 2001 : 263 ).

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam bukunya “ Sekitar klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank “ sebagaimana yang dikutip oleh Rachmadi Usman, 2001 : 264 ) menyebutkan tentang beberapa fungsi perjanjian kredit, diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku ( *standards contract* ), di mana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir ( blanko ), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu ( *vorn vrij* ). Keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar usahanya. Dunia perdagangan sangat membutuhkan perjanjian baku guna menunjang dan menjamin kelangsungan usahanya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini ( 1999 : 98 ) menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja, tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Bentuk perjanjian kredit sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain nasabah

peminkam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. sebagaimana pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa :

“ Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 “.

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Marhainis Abdul Hay ( dalam Rachmadi Usman 2001 : 234 ), yaitu :

“ Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata “.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini ( 1999 : 97 ) mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur seperti yang dilakukan oleh peminjam uang ( debitur ) pada perjanjian pinjam meminjam uang biasa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab XIII dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama ( *onbeniemde overeentkoms* ) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perbankan yang diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan kontrak ( Rachmadi Usman, 2001 : 263 ).

Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut , sering terjadi salah satu pihak, baik kreditur ataupun debitur tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga dimungkinkan pihak-pihak tersebut mengajukan klaim / ganti rugi. Adapun persoalan ganti rugi atau klaim mengenai ganti rugi muncul setelah salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian atau kontrak bisnis tersebut melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Istilah wanprestasi sering disebut juga cidera janji atau ingkar janji atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *default* atau *non fulfillment* atau *breach of contract*. Siti Ismijati Jenie ( dalam Gatot Supramono, 1995 : 12 ) mengatakan :

“ Bahwa pengaturan mengenai wanprestasi tersebar di dalam beberapa pasal di dalam Buku III KUHPdata antara lain :

1. Bagian Kedua Bab Kesatu tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu yaitu Pasal 1236 yang menyebutkan “ si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan atau lebih tidak merawatnya guna menyelamatkan kannya “.

2. Bagian Ketiga Bab Kesatu, tentang perikatan-perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yaitu Pasal 1239 : “ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan perjanjian biaya, rugi, bunga ”. Serta Pasal 1242 menyebutkan : jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang memapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu saja wajibliah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga.
3. Bagian Keempat Bab Kesatu, tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya perikatan. ”

Dari apa yang diuraikan di atas, tidak dapat dijumpai pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Dalam pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan beberapa istilah yaitu “ Keadaan tidak mampu ”, “ tidak memenuhi kewajiban ”, serta “ berlawanan dengan perikatan ”, dan istilah-istilah mana hanya menunjuk pada bentuk-bentuk wanprestasi.

Sedangkan mengenai pengertian wanprestasi itu sendiri, beberapa pakar hukum memberikan pendapat yang berbeda-beda, yaitu :

- 1) Subekti ( 1996 : 45 ) mengatakan : “ Bahwa apabila si berutang ( debitur ) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dilakukannya ”.
- 2) Hasim Nauhasy ( 2005 : 46 ) mendefinisikan wanprestasi sebagai berikut : “ Tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam kontrak yang telah disepakati bersama ”.

Dengan demikian wanprestasi ( *breach of contract* ) telah terjadi apabila salah satu pihak tanpa alasan yang sah gagal atau menolak melaksanakan perbuatan tertentu ( *perform* ) yang diharapkan pihak lain dari padanya atau melaksanakan isi kontrak dengan tidak sempurna ( *defective* ) atau membuat suatu situasi sehingga dirinya tidak mampu ( *incapacity* ) melaksanakan kontrak tersebut pada waktunya.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, menurut Subekt (1996 : 45), mengatakan hal yang hampir sama yaitu :

“ Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, Abdul Kadir Muhammad ( 2003 : 203 ), mengatakan bahwa :

“ Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang telah diwajibkan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan, yaitu :

- 1) Karena alasan debitur, baik dengan sengaja, tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- 2) Karena keadaan memaksa ( *overmacht / force majeure* ), di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah”.

Pertanyaannya adalah saat kapan wanprestasi itu dapat terjadi. Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi perlu diperhatikan, apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Pasal 1238 KUHPdata menentukan : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ”. Menurut Jerry Gabriel ( 1993 : 4 ) dikatakan “ Wanprestasi ( *breach of contract* ) hanya mungkin terjadi karena 3 hal, yaitu : 1) setelah kontrak dibuat sebelum pelaksanaannya, 2) tidak melaksanakan pada waktu pelaksanaannya, 3) melaksanakan dengan tidak sempurna”.

Sedangkan akibat atau hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan wanprestasi menurut Subekti ( 1996 : 45 ) ada 4 ( empat ) macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.

Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum ( perbuatan melawan hukum karena undang-undang atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa ). Wanprestasi sesuai asas hukum, terjadi karena adanya pelanggaran terhadap suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh setiap orang yang terikat kontrak atau perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi karena dilanggarnya ketentuan-

ketentuan hukum ( baik yang merupakan kewajiban atau larangan ) yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam hal ini Rosa Agustina ( 2003 : 32 ) mengatakan :

“ Pentingnya perbedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah karena dalam praktek biasanya penggugat mulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia minta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian ”.

Namun demikian dalam praktek seseorang ( terlebih yang awam hukum ), dapat mengalami ketidakjelasan akan suatu peristiwa, sehingga tidak tahu apakah gugatan ganti rugi tersebut didasarkan pada tidak terlaksananya sebuah perjanjian atau kontrak ( wanprestasi ) atau berdasarkan perbuatan melawan hukum atau kedua-duanya. Yang pasti kedua peristiwa itu, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, muaranya adalah menuntut ganti rugi. Adapun tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi didasarkan pada Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **4. Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-lembaga Hukum**

Kalau penyelamatan kredit melalui restrukturisasi seperti telah diuraikan di atas, penyelesaian lebih ditekankan pada negosiasi Kreditur dan Debitur untuk menemukan solusi yang bisa dilaksanakan kedua pihak. Debitur harus memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran-saran dari Kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Jadi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini hubungan Kreditur dan Debitur masih dipertahankan. Jika pemutusan hubungan Kreditur dan Debitur terjadi maka pemutusan itu terjadi berdasarkan kesepakatan. Dalam bahasa penyelamatan kredit langkah ini biasa disebut merupakan jalan keluar pertama atau *First Way Out*.

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelamatan kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara Kreditur dan Debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum lebih ditujukan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang Debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategi dan *marketable* didukung dokumen yang lengkap Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum

terpaksa dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi Debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut *Second Way Out*.

Langkah-langkah penyelamatan kredit ( *Second Way Out* ) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi :

**a. Somasi**

Somasi atau peringatan oleh Kreditur kepada Debitur agar Debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo di sini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun Debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi Debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda. Peringatan atau somasi ini dapat dilakukan Kreditur / Bank sendiri langsung kepada Debitur. Peringatan dapat dilakukan beberapa kali. Bukti peringatan atau somasi ini dapat digunakan oleh Kreditur sebagai alat bukti pada waktu mengajukan somasi atau gugatan atau eksekusi melalui Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Kreditur beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada Debiturnya. Jadi somasi atau peringatan dapat dilakukan sendiri oleh Kreditur atau melalui bantuan Pengadilan.

Somasi menurut Pasal 1238 KUHPdata adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada Debitur untuk segera membayar / menyelesaikan hutangnya kepada Kreditur. Somasi melalui Pengadilan ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian bahwa Debitur telah cidera janji. Namun untuk menentukan Debitur cidera janji tidak harus ditentukan adanya somasi dari Pengadilan. Dengan lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang ditentukan tetapi Debitur belum melakukan pembayaran juga bisa dikualifikasikan Debitur telah cidera janji.

Pengadilan akan melakukan somasi jika ada permohonan terlebih dahulu dari Krediturnya maka Kreditur harus mengajukan permohonan somasi secara tertulis kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi domisili hukum Debitur atau domisili yang telah dipilih sesuai perjanjian kredit. Atas permohonan somasi dari Kreditur, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan Pengadilan tentang Debitur cidera janji dan memberikan surat somasi kepada Debitur yang isi pokoknya :

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan / pemberitahuan Kreditur.
- 3) Batas waktu bagi Debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitur untuk membayar, artinya jika debitur yang disomasi tidak memenuhi atau menghiraukan somasi tersebut maka Kreditur tidak dapat memaksa. Namun dengan adanya somasi diharapkan

adanya tekanan psikologis dan membuat malu Debitur sehingga Debitur diharapkan menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan hutangnya.

#### **b. Gugatan Kepada Debitur**

Apabila somasi atau teguran yang diberikan Kreditur sendiri atau somasi melalui bantuan pengadilan tidak mendapat tanggapan dari Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan Kreditur menurut hukum ialah mengajukan gugatan perdata kepada Debitur melalui Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan Debitur macet / cidera janji dan penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya maka penyelesaian yang harus ditempuh Kreditur menurut hukum, Kreditur harus mengajukan gugatan perdata kepada debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika Kreditur memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Kreditur tidak dibenarkan memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, menciderai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada Debitur agar membayar hutangnya. Kreditur juga tidak dibenarkan menjual sendiri jaminan pemilik dari jaminan yang ada. Tindakan-tindakan Kreditur seperti itu merupakan tindakan yang ingin melaksanakan haknya sesuai kehendak sendiri dan sewenang-wenang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Hak-hak yang dimiliki Kreditur / Bank untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian hutang dari debitur harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari Pengadilan yang isinya memberikan hak kepada Kreditur untuk memaksa Debitur melunasi hutangnya. Untuk memperoleh putusan dari Pengadilan Kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Debitur atau pihak lain yang turut bertanggung jawab atas hutang Debitur melalui Pengadilan Negeri. Jadi tujuan Kreditur mengajukan gugatan kepada Debitur antara lain :

- 1) Untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.
- 2) Untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang tetap / pasti dari Pengadilan.
- 3) Putusan Pengadilan yang tetap / pasti inilah merupakan perlindungan hukum bagi Kreditur untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada Debitur untuk membayar kembali hutangnya.
- 4) Jika Debitur berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap / pasti tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya maka Kreditur dapat menggunakan putusan Pengadilan tetap / pasti itu sebagai dasar hukum untuk melelang harta milik Debitur bail yang dijaminan atau harta lain yang tidak menjadi jaminan.
- 5) Untuk melakukan lelang harta kekayaan debitur berdasarkan keputusan Pengadilan yang tetap / pasti, Kreditur harus mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan setempat

dimana barang yang akan dilelang berada. Kemudian Pengadilan akan meminta bantuan kantor lelang untuk melaksanakan lelang harta Debitur.

- 6) Dengan adanya gugatan itu, secara hukum Debitur memiliki kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui persidangan di Pengadilan. Dengan demikian dalam menyelesaikan Debitur cidera janji hukum memberikan keseimbangan hak Kreditur dan debitur. Hukum memberi perlindungan yang sama antara Kreditur dan Debitur.

Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada Debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang digunakan untuk memproses gugatan sampai ada keputusan memerlukan waktu terlalu lama karena terikat pada prosedur acara perdata. Tenaga yang dibutuhkan sangat menyita waktu kerja karena harus menghadiri persidangan berulang-ulang yang kadang-kadang jam persidangan selalu mundur dari jadwal yang ditentukan. Juga biaya yang harus dikeluarkan oleh Kreditur selama proses tersebut berjalan.

#### c. **Eksekusi Putusan Pengadilan *Uitvoer Bij Vooraad***

*Uitvoer Bij Vooraad* atau dalam Bahasa Indonesia lazim diartikan “ pelaksanaan putusan terlebih dahulu “ artinya suatu putusan Pengadilan dapat dilaksanakan eksekusinya meskipun keputusan itu belum mempunyai keputusan hukum yang tetap karena Tergugat menajukan upaya hukum perlawanan atau banding atau kasasi. Suatu putusan Pengadilan memiliki kekuatan “ pelaksanaan putusan terlebih dahulu “ apabila majelis hakim yang mengadili perkara itu mengabulkan tuntutan Penggugat agar putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dikabulkannya pelaksanaan keputusan terlebih dahulu tercermin dari amar putusan Pengadilan Negeri.

Lembaga “ keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu “ diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR ( untuk Jawa dan Madura ) dan Pasal 191 ayat (1) RBG ( luar Jawa ) yang mengatur persoalan yang sama. Pasal tersebut menentukan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.

Subekti, SH. ( 1977 : 56 ) menjelaskan makna ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa menjatuhkan keputusan dengan ketentuan “ dapat dilaksanakan terlebih dahulu “ jika memenuhi syarat-syarat :

- 1) Ada surat otentik atau tulisan ( *handschrift* ) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
- 2) Ada suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti ( *in kracht van gewijsde* ) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- 3) Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.



4) Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezit recht* ( kepemilikan benda ).

Perkataan “ dapat “ dalam pasal tersebut mengandung arti majelis hakim boleh menjatuhkan putusan “ dapat dilaksanakan terlebih dahulu “ atau tidak menjatuhkan keputusan. Jadi tidak ada keharusan. Bahkan seandainya hakim menjatuhkan putusan “ dapat dilaksanakan terlebih dahulu “ maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

Untuk menjatuhkan keputusan tersebut, hakim harus sangat berhati-hati karena lembaga ini sangat membahayakan jika hakim telah menjatuhkan dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan eksekusinya telah dilakukan kemudian di tingkat banding keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan. Untuk mengembalikan hak-hak Tergugat tidak mudah dan bahkan tidak mungkin lagi.

Karena lembaga yang menjatuhkan keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu banyak mendatangkan kesulitan dalam praktek maka Mahkamah Agung melalui berbagai surat edaran misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang isi pokoknya menginstruksikan kepada Pengadilan-pengadilan Negeri agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( *Uit voerbaar bij Voorraad* ). Kemudian Mahkamah Agung menegaskan lagi dengan SEMA No. 5 Tahun 1969 yang berbunyi :

“ Menyambung SEMA Tanggal 10 Juli 1964 No. 13 / 1964 dengan ini diberitahukan :

- 1) Bahwa yang dimaksud SEMA Tanggal 10 Juli 1964 No. 13 /1964 adalah permintaan persetujuan untuk melaksanakan suatu putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan atau *verzet*, permintaan banding atau kasasi ( *executie uitvoerbaar bij voorraad* ).
- 2) Apabila terhadap putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya, maka untuk itu Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan. “

Meskipun Mahkamah Agung melalui SEMA telah menginstruksikan kepada Pengadilan Negeri agar tidak mudah menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, tidak berarti Pengadilan dilarang sama sekali untuk menjatuhkan keputusan dapat dijalankan lebih dahulu. Pengadilan masih dimungkinkan menjatuhkan keputusan dapat dijalankan terlebih dahulu untuk perkara tertentu dengan syarat-syarat sesuai Pasal 180 HIR/191 (1) RBG di atas. Dalam perkara hutang piutang atau pemberian kredit telah memiliki bukti otentik berupa perjanjian kredit yang membuktikan bahwa Debitur berutang kepada Penggugat. Seorang yang berutang sudah jelas tidak dapat menyangkal hutang yang diterimanya. Dengan demikian suatu perkara gugatan tentang Debitur cidera janji karena tidak mengembalikan hutangnya sudah pada tempatnya keputusan Pengadilan menjatuhkan keputusan “ dapat dilaksanakan terlebih dahulu “. Tujuan akhir dari gugatan untuk memperoleh putusan tetap dari Pengadilan sebagai dasar mengeksekusi harta benda Debitur yang menjadi jaminan atau harta yang dijaminkan. Jadi gugatan mengenai kewajiban membayar hutang atau mengembalikan

kredit adalah tepat bagi Pengadilan untuk memberikan keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *uitvoerbaar bij voorraad* ).

#### **d. Eksekusi *Grosse Akta Pengakuan Hutang***

Penyelamatan kredit melalui gugatan ke Pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh keputusan Pengadilan yang pasti memerlukan waktu yang cukup lama karena terikat pada sistem dan prosedur hukum acara perdata yaitu melalui persidangan berkali-kali sesuai acaranya dan belum lagi jika Debitur sebagai Tergugat mengajukan banding dan kasasi setelah mendapat keputusan Pengadilan. Menyadari bahwa penagihan piutang atau penyelaman kredit melalui prosedur gugatan memerlukan waktu lama maka pembentuk undang-undang memberikan pengecualian dari prosedur penagihan piutang melalui gugatan. Dengan adanya pengecualian yang diciptakan pembentuk undang-undang tersebut maka dalam menyelesaikan Debitur yang wanprestasi Kreditur tidak perlu menempuh melalui gugatan perdata kepada Debitur tetapi dapat langsung mengeksekusi jaminan kredit berdasar *grosse akta pengakuan hutang*.

Mengapa *grosse akta pengakuan hutang* dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit? untuk menjawab pertanyaan ini dapat mengacu ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBG yang berbunyi sebagai berikut :

“ Surat asli dari pada surat hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan “ atas nama keadilan “ di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim “.

Dari ketentuan pasal tersebut ada dua akta yang oleh undang-undang diberi kekuatan sama dengan keputusan hakim yang berkekuatan tetap, yakni :

- (1) Surat asli hipotik diartikan *Grosse Akta Hipotik* yang memiliki irah-irah “ Atas Nama Keadilan “. *Grosse akta hipotik* artinya salinan atau turunan pertama dari minut akta hipotik. Bunyi irah-irah seperti itu sekarang telah diganti dengan bunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Hipotik merupakan merupakan pengikatan jaminan yang diatur dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan tanah dan benda di atasnya serta kapal laut dengan bobot tertentu / kapal udara. Hipotik yang berkaitan dengan tanah telah diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- (2) Surat Hutang diartikan *grosse akta pengakuan hutang* yang dibuat oleh notaris yang mempunyai irah-irah Atas Nama Keadilan. *Grosse akta pengakuan hutang* artinya salinan atau turunan pertama dari minut akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris. Bunyi irah-irah seperti itu sekarang telah diganti dengan irah-irah yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.
- (3) *Grosse akta-akta* tersebut di atas dapat digunakan oleh Kreditur sebagai dasar mengajukan eksekusi jaminan melalui Pengadilan tanpa harus mengajukan gugatan dengan syarat debitur dianggap melakukan cidera janji.

Karena *grosse* akta hipotik ( sekarang hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah ) dan *grosse* akta pengakuan hutang oleh pembentuk undang-undang diberi kekuatan yang sama dengan keputusan hakim yang tetap, maka *grosse-grosse* akta tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan eksekusi atas jaminan kredit. Dengan adanya *grosse* akta pengakuan hutang atau *grosse* hipotik maka akan menyelesaikan kredit macet Kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada Debitur melalui Pengadilan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa penyelesaian kredit dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada Debitur tidak efisien sehingga pembentuk undang-undang menciptakan akta-akta yang berkekuatan hukumnya disamakan dengan keputusan hakim yang tetap yang merupakan pengecualian dari prosedur gugatan.

Pembentuk undang-undang menciptakan akta-akta yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim yang tetap sangat menguntungkan Bank atau Kreditur lainnya, maka bank-bank dalam memberikan kredit harus membuat akta pengakuan hutang notariil selain perjanjian kredit di bawah tangan. Jika suatu saat Debitur cidera janji, Bank dapat meminta Notaris yang membuat akta untuk menerbitkan *grosse* akta pengakuan hutang sebagai dasar untuk mengajukan eksekusi langsung atas jaminan kredit tanpa harus mengajukan gugatan kepada Debiturnya.

#### **e. Eksekusi Hak Tanggungan / *Grosse* Akta Hipotik**

*Grosse* akta hipotik yang memiliki irah-irah dengan kata-kata “ Atas nama Keadilan “ yang sekarang irah-irah telah diganti dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, irah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 224 HIR/258 RBG mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan yang tetap. Ini merupakan keputusan pembentuk undang-undang yang merupakan pengecualian dari penyelesaian prosedur penagihan hutang melalui gugatan yang memerlukan waktu, tenaga lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan memiliki *grosse* akta hipotik ini Kreditur tidak perlu mengajukan gugatan kepada Debitur supaya membayar hutangnya tetapi dapat mengajukan eksekusi langsung atas jaminan yang telah dibebani hipotik itu. Eksekusi jaminan diajukan melalui Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum kaminan itu berada dengan mengajukan permohonan eksekusi.

Jumlah jaminan hipotik yang diatur dalam KUHPerdata khususnya yang berkaitan dengan tanah sekarang sudah tidak berlaku lagi karena jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dan benda yang ada di atas tanah tersebut telah diatur kembali oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mencabut ketentuan-ketentuan hipotik yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan hipotik tentang kapal laut dengan bobot tertentu dan kapal udara masih berlaku. Karena ketentuan hipotik yang berkaitan dengan tanah sudah tidak berlaku lagi maka pembahasan eksekusi ini ditekankan pada eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang hak tanggungan.

Ketentuan-ketentuan undang-undang hak tanggungan sebagian mengadopsi ketentuan hipotik sehingga dengan membaca ketentuan hipotik dalam KUHPdata akan lebih mudah memahami ketentuan hak tanggungan. Jadi undang-undang hak tanggungan itu sebenarnya menyempurnakan saja ketentuan hipotik untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan untuk menampung dunia perkreditan sekaligus menjamin kepastian hukum. Pembentuk undang-undang hak tanggungan juga menciptakan pengecualian penyelesaian hutang tidak semata-mata melalui gugatan tetapi dapat memanfaatkan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar hukum eksekusi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 14 yang menentukan : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tanah. Bagi kreditur yang telah memegang sertifikat hak tanggungan, jika Debitur cidera janji maka untuk melakukan penagihan piutangnya, Kreditur dapat mengajukan eksekusi langsung atas jaminan tanpa harus mengajukan gugatan.

## 5. Teori Bekerjanya Hukum

Untuk mengukur adanya sistem hukum maka terdapat asas yang dinamakan *Principles of Legality* sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bias dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bias dimengerti;
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi;
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari ( Fuller dalam Esmi Warassih, 2005 : 24 ).

Teori Stufenbau dari Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu peraturan hukum ( sudah ) merupakan satu sistem bila semua peraturan hukum merupakan satu susunan kesatuan berdasarkan Grundnorm ( Satjipto Rahardjo, 2005 : 50 ).

Beberapa alasan untuk mempertanggungjawabkan bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, tetapi harus dikaitkan dengan masalah keabsahannya yaitu apabila dikeluarkan oleh sumber ( sumber-sumber ) yang sama seperti peraturan hukum yurisprudensi, kebiasaan.
- 2) Sumber tersebut melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang sebagai praktisi penerapan peraturan hukum dan juga sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan praktek itu seperti penafsiran / pola penafsiran yang seragam.

Menurut pendapat Hoebel dalam Esmi Warassih ( 2005 : 26 ), menyebutkan adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu :

- 1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
- 2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif.
- 3) Menyelesaikan sengketa.
- 4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Di samping itu, hukum menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Parson sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih ( 2005 : 27 ), bahwa : “ fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial ”.

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara lain Bertalanffy dan Kenneth Building ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 29 ), ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek : (1) keintegrasian, (2) keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, (5) keterhubungan komponen satu sama lain, dan (6) ketergantungan komponen satu sama lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaimana tersebut, sistem itu juga harus berorientasi kepada tujuan ( Esmi Warassih, 2005 : 30 ).

Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, dikemukakan antara lain oleh Lawrence Friedman dalam Esmi Warassih ( 2005 : 30 ), bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen struktur, substansi dan kultur :

- 1) Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para *lawyers and judges*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.

Selain itu menurut pendapat Leon L. Fuller ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 31 ) dikatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem maka harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 ( delapan ) asas atau *principles of legality* berikut ini :

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.

- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini penting artinya untuk menghindari terjadinya kontradiksi atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Pemahaman ini semakin penting artinya, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan ( eksistensi ) hukum sebagai suatu sistem norma mempunyai daya guna dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan efektivitas hukum ini, persyaratan yang diajukan oleh Fuller di dalam penjelasan hukum sebagai suatu sistem norma kiranya perlu diperhatikan.

Selain itu, Paul dan Dias dalam Esmi Warassih ( 2001 : 105 – 106 ) mengajukan 5 ( lima ) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

- 1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah

efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan ( *law in action* ) dengan hukum dalam teori ( *law in theory* ), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action* ( Satjipto Raharjo, 2000 : 19 ).

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ( ideal ) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim ( *case law* ), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

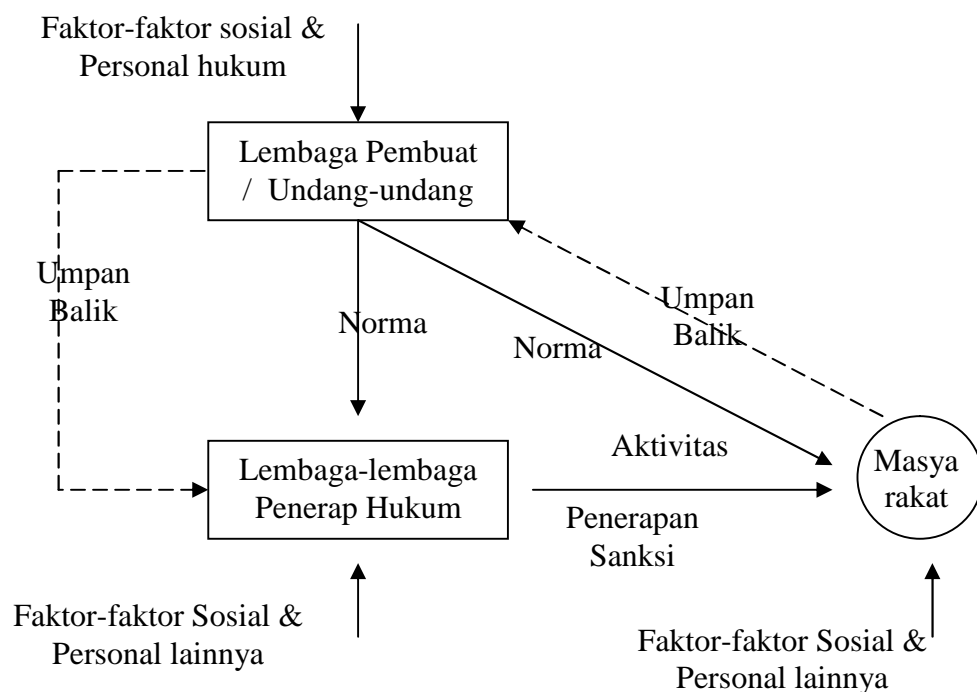
Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 13 ).

Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah *efektivitas* tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum.



Menurut Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo ( 1980 : 27 ) dikatakan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Dari arah panah-panah sebagaimana yang terlihat pada bagan 1, dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

Teori bekerjanya hukum dari Lawrence M. Friedman tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat**

## **B. Kerangka Berpikir**

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian kredit bank terjadi antara pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur ( peminjam ). Proses penyaluran kredit dari pihak bank kepada nasabah selaku kreditur harus dilakukan

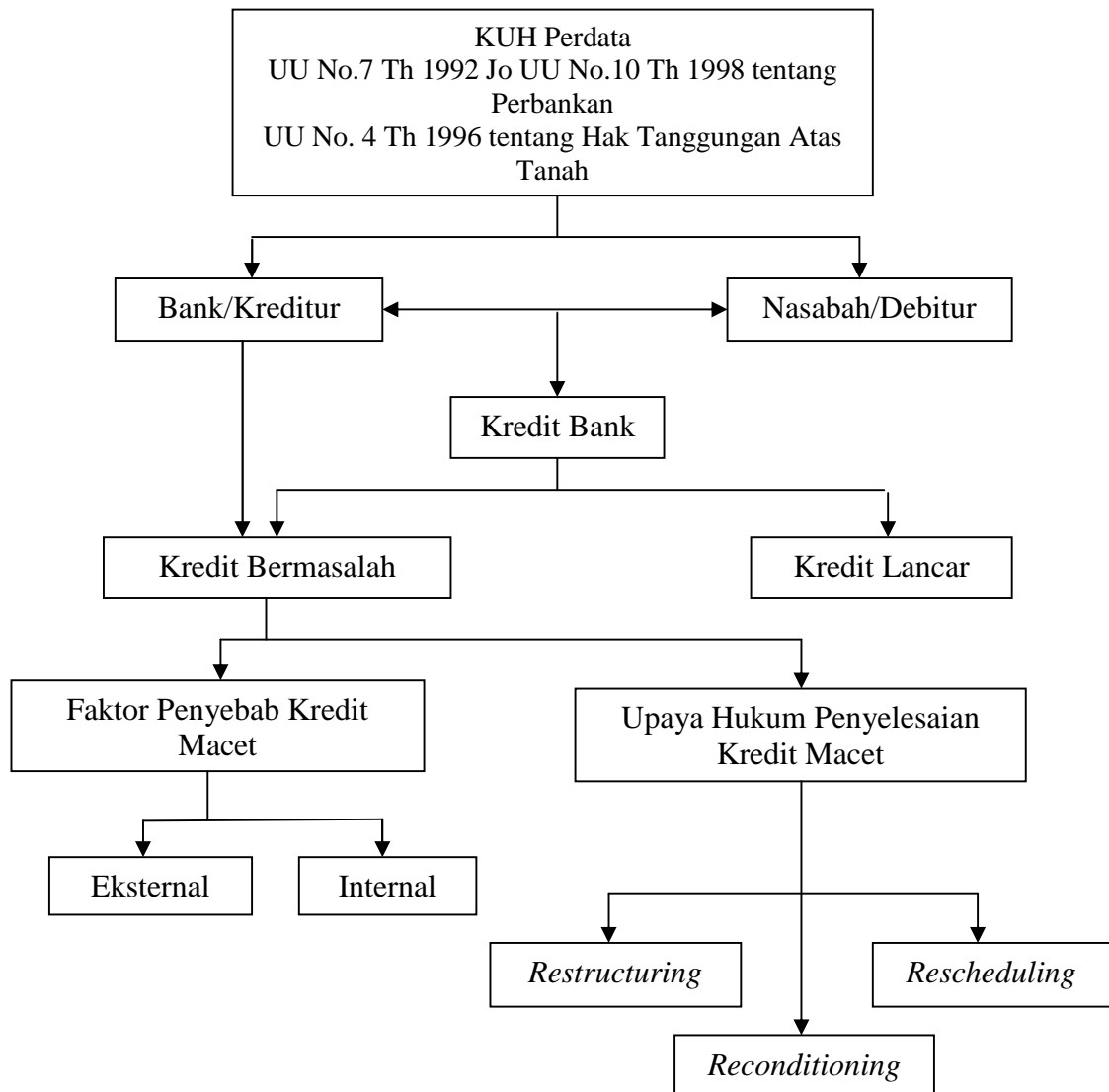
melalui beberapa tahapan penilaian dan analisis kredit oleh pihak bank terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah selaku debitur.

Penilaian dan analisis kredit yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit bank. Penilaian dan analisis yang dilakukan oleh pihak bank meliputi 5 ( lima ) kriteria penilaian yang sering disebut dengan “ *Five C’s of Credit* ” yang meliputi :

1. *Character* atau watak.
2. *Capacity* atau kemampuan.
3. *Capital* atau modal / kekayaan.
4. *Collateral* atau jaminan / agunan.
5. *Condition* atau kondisi ( usaha, nasabah dan ekonomi secara umum ).

Berdasarkan penilaian dan analisis tersebut bank akan menyalurkan kredit kepada nasabah yang mengajukan permohonan kredit dan secara garis besar dalam pelaksanaan kredit bank dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah.

Berikut disajikan kerangka berpikir dari penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



**Gambar 2**  
**Kerangka Berpikir**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode ( cara atau prosedur ) yang harus ditempuh agar bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar ( dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just* ), guna menjawab masalah tertentu itu ( Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 : 123 ).

Melalui penelitian akan diperoleh temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah. Dengan menemukan pengetahuan baru yang benar, berdasarkan metode-metode yang dipatuhi secara penuh disiplin, akan meniadakan ketidaktahuan atau mengatasi keraguan. Seperti halnya dalam upaya pencarian lain yang diharapkan memberikan hasil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui terlebih dahulu informasi apa yang sesungguhnya ingin diperoleh, dan dimana letak sumber-sumber yang dapat digali untuk menghasilkan informasi atau data yang diperlukan, yang kemudian dapat digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengatahuan baru. Langkah berikutnya adalah dengan menemukan cara-cara atau metode pencarian, penemuannya, beserta ketrampilan untuk mengaplikasikan metode tersebut ( Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 : 139 – 140 ).

#### **A. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian hukum, metode yang akan dipakai sangat tergantung pada konsep apa tentang hukum. Setiono ( 2002 : 1 ) mengikuti pendapat Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan adanya 5 ( lima ) konsep hukum, yaitu :

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto* dan tersistemasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang berkembang, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebaga tampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penulisan tesis ini, penulis memakai konsep hukum ke-5 ( ke lima ), yaitu manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam

interaksi mereka. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto ( 1974 : 147 ) penelitian *non-doktrinal* adalah penelitian atas hukum yang tidak dikonsepsikan dan dikembangkan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola, sebagai realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris. Hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di mana hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola.

Bogdan dan Taylor ( dalam Burhan Arshofa 1996 : 21-22 ) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara *holistik* ( utuh ). Menurut Lexy J. Moleong ( 2004 : 112 ), kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Dalam upaya menemukan fakta dan data secara ilmiah, maka peneliti menetapkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui studi kasus dengan pertimbangan bahwa tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu. Studi kasus digunakan untuk keperluan penelitian, mencari kesimpulan dan diharapkan dapat ditemukan pola, kecenderungan, arah dan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan perkembangan masa depan

Dalam penelitian ini dimaksudkan tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan keadaan apa adanya tentang suatu variabel atau keadaan. Kata-kata yang tergambar dalam penelitian deskriptif bertolak pada penafsiran data yaitu melalui suatu alur berpikir logis.

Dikonsepkan sebagai gejala empiris yang teramati di dalam pengalaman, hukum jelas tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, kini hukum

terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya, yang bekerja – dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Karena dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak atau beroperasi di dunia yang empiris, hukum – baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuatkeputusan *in concreto* yang berkekuasaan – dari perspetif ini kini hukum akan menampakkan diri sebagai realitas sosial yang kasat mata, yang tentunya akan bisa dikategorikan berdasarkan keajegan-keajegan ( *regulaties nomos* ) atau keseragaman-keseragaman ( *uniformities* ) peristiwanya. Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati. Maka hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara sintifis, non-doktrinal, dan tidak akan lagi dijadikan “ sekedar “ obyek penggarapan-penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka ( atas dasar prosedur logika deduktif semata-mata ) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 : 193-194 ).

Berdasarkan konsep hukum yang kelima dan dengan pendekatan makro yang dilakukan, maka gejala empiris yang diamati dalam penelitian ini adalah yang berkaitan yang dilakukan oleh kreditur dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah ( *non performing loan* ). Dalam hal ini, peneliti ingin mengamati, mengidentifikasi dan menganalisa tentang perilaku dari pihak Bank dalam menerapkan ketentuan undang-undang.

Penelitian-penelitian non-doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori akan eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori ini dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro dan pada umumnya amat kuantitatif untuk mengelola data itu sangat massal terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut *the social theories of law*.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Bank BRI Cabang Temanggung. Adapun pemilihan lokasi lebih didasarkan pada kemudahan mendapatkan data, lebih persuasif, dan jumlah kredit macet cukup besar untuk kapasitas sebuah Kantor Cabang BRI. Alasan subyektif lebih disebabkan

lokasi penelitian dekat dengan instansi kerja penulis sehingga sangat efektif dan efisien dalam pengumpulan data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian yang lain adalah sebagai berikut :

1. Kantor BRI Cabang Temanggung.
2. Perpustakaan UNS.
3. Perpustakaan Program Pascasarjana.

### **C. Responden**

Dalam penelitian ini subyek yang diteliti dipandang sebagai responden yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Untuk menentukan responden digunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana pertimbangan keputusan pemilihannya terdapat di tangan peneliti dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purpose sampling*. Selanjutnya responden responden yang dimaksud adalah :

1. Pemimpin Bank BRI Cabang Temanggung.
2. Pejabat Bank BRI Kanwil Jawa Tengah
3. Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Temanggung.
4. Nasabah / Debitur BRI Cabang Temanggung.
5. Advokad / Penasihat Hukum

### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

Penelitian hukum empiris ( *non doctrinal* ) maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer dan data sekunder

#### **1. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan direksi / pimpinan BRI Cabang Temanggung, Kepala Bagian / Staf Administrasi Kredit, dan Debitur yang mengalami kemacetan dalam membayar kredit sebanyak 5 ( lima ) orang

##### **b. Data Sekunder**

yaitu keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer.

Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, peristiwa, tingkah laku, yang didapat melalui wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan pejabat / pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung, para debitur kredit macet, informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dianggap mengerti permasalahan yang akan diteliti.

### b. Sumber data sekunder.

- Untuk memberikan dasar kekuatan mengikat ke dalam, maka diperlukan data sekunder yang merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dan literatur-literatur yang mendukung data primer.

Data sekunder dibidang hukum ( dipandang dari sudut pandang pengikatnya ) dapat dibedakan menjadi ( Rony Hanitijo Soemitro, 1994 : 53 ) :

#### 1) Bahan-bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah
- d) Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktifa Produktif, Kolektibilitas / Penggolongan Kredit bagi Bank Umum.
- e) Yurisprudensi.

#### 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :

- a) Berbagai keputusan tentang perbankan, khususnya tentang kredit macet..
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana



c) Hasil-hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

a) Kamus Hukum

b) Kamus Hukum Ekonomi

c) Kamus Bahasa Indonesia

d) Kamus Bahasa Inggris

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah mencakup wawancara, observasi dan studi kepustakaan, sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Dalam penelitian hukum non doktrinal ( sosiologis ) ini, untuk memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat dengan melakukan wawancara. Peneliti terlibat langsung berwawancara dengan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung, staf Administrasi BRI Cabang Temanggung ( bagian kredit, supervisor, offisier kredit ), Pejabat Bank Indonesia Wilayah IV Yogyakarta, nasabah / debitur kredit macet, dan advokad / penasihat hukum

### **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan ( Rony Hanitijo Soemitro, 1994 : 62 ). Dalam observasi ini peneliti terlibat langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung.

### **c. Studi Kepustakaan**

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misal ( Bambang Sunggono, 1997 : 115 ) :

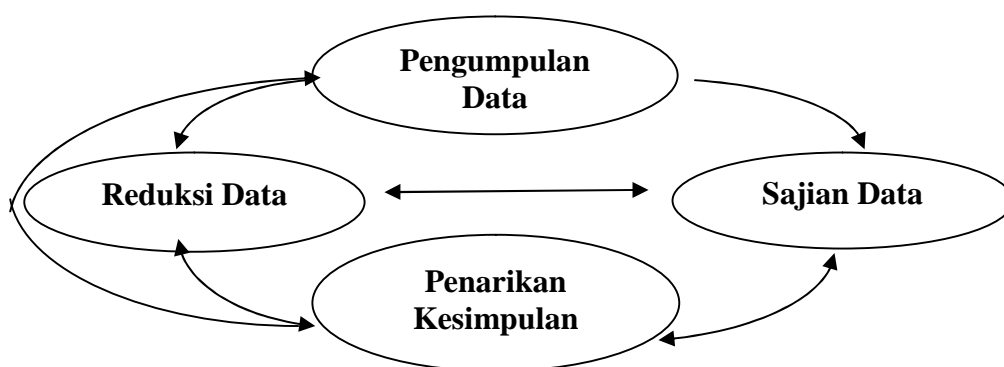
1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder.
3. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.

4. Mengetahui informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang digunakan.
5. Memperkaya ide-ide baru.
6. Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian analisis data merupakan tahap yang penting, sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto, 1994 : 250 ).

Adapun analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Untuk data yang sudah terkumpul akan diseleksi kemudian disusun dan disajikan barulah selanjutnya diambil kesimpulan. Jika dalam seleksi terdapat data yang tidak diperlukan maka data tersebut direduksi atau dikurangi. Demikian pula dalam tahap seleksi, penyusunan dan penyajian apabila ada data yang kurang lengkap maka akan dilakukan pengumpulan data di lapangan kembali dan seterusnya agar data yang diperlukan menjadi lengkap. Berdasarkan analisis data tersebut diatas, menurut HB. Sutopo ( 2002 : 87 ) apabila digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3**  
**Model Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat diketahui apa yang terjadi dan ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat berupa kalimat-kalimat, cerita-cerita ataupun tabel-tabel.
3. Verifikasi, sejak permulaan pengumpulan data dilakukan pencatatan, pertimbangan pada peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proporsi untuk mengetahui apa dari hal-hal yang kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini sekaligus merupakan jawaban atas perumusan masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### Data-data Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ) di Bank BRI Cabang Temanggung

**Tabel I**  
**Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* )**

Tahun	Jumlah Pinjaman ( dlm Rp 000 )	Jumlah Debitur	Pokok ( dlm Rp.000 )	Bunga ( dlm Rp 000 )	Total NPL (dlm Rp000 )	%
2002	40.341.492.	17	1.399.088.	104.932.	1.504.020.	3,47
2003	45.233.749.	17	552.305.	41.423.	1.593.728.	1,22
2004	54.436.552.	4	185.000.	13.875.	198.875.	0,34
2005	67.011.415.	6	1.096.182.	82.213.	1.178.395.	1,64
2006	86.282.026.	9	3.077.248.	230.794.	3.308.042.	3,57

Sumber : Laporan Kolektibilitas Pinjaman BRI Cabang Temanggung Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas mengenai permasalahan kredit macet yang terjadi di Bank BRI Cabang Temanggung disimpulkan sebagai berikut : Tahun 2002 *Non Performing Loan* sebesar 3.47 %. Tahun 2003 sebesar 1.22 %, Tahun 2004 sebesar 0.34 %, Tahun 2005 sebesar 1.64 % dan Tahun 2006 sebesar 3.57 %.

Besarnya jumlah kredit bermasalah ( *non performing loan* ) yang terjadi pada Tahun 2002 dan 2003, menurut keterangan *Dede Supriatna* ( Pimpinan BRI Cabang Temanggung ) disebabkan karena pembiayaan disektor pertanian dan perkebunan merupakan andalan atau sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja dan merupakan andalan untuk Kabupaten Temanggung dan sekitarnya serta adanya kebijakan Pemerintah dalam memberikan prioritas penyaluran kredit untuk usaha-usaha tersebut, sehingga membutuhkan investasi / dana segar dari Bank dengan sistem *loan credit* ( kredit lunak ). Macetnya kredit terutama pada tidak lancarnya angsuran baik angsuran pokok kredit dan bunga, sehingga dalam perhitungan akhir baik tunggakan pokok kredit dan bunga tersebut mencapai total sebesar 3,47 % dan 1,22 % dari nilai pinjaman kreditnya.

Disamping itu adanya kredit bermasalah / macet tersebut diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari adanya kebijakan moneter pada saat itu, sehingga

mempengaruhi hasil produktivitas pertanian dan perkebunan. Pada sektor kredit konsumtif timbulnya kredit macet lebih disebabkan kesalahan penggunaan atau kesalahan administrasi pengelolaan nasabah / debitur misalnya mengadakan / melakukan disertifikasi usaha-usaha yang tidak dirancang dan diprediksikan secara cermat, pembelian aset yang tidak / kurang produktif misalnya tanah , bangunan, pabrik dan sebagainya. Di sisi yang lain adanya perusahaan yang terlalu banyak memakai modal dari luar ( modal asing ) sehingga jumlah bunga yang harus dibayarkan terlalu besar, dan menekan rentabilitas dan likuiditas perusahaan itu sendiri. Kesalahan ini merupakan kesalahan dalam manajemen keuangan perusahaan yaitu tidak dapatnya mengatur suatu perbandingan struktur permodalan yang wajar antara dana luar dan dana sendiri .

Menurut *Bambang* ( analis dan *officer* kredit ), kredit bermasalah juga disebabkan karena kesalahan dalam lamanya waktu penggunaan, karena jika dana jangka pendek digunakan untuk pembiayaan aktiva maka perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan tenang, karena selalu dihadapkan pada masalah pencarian dana untuk mengembalikan utang jangka pendek tersebut.

**Tabel II**

**Kredit Usaha Yang Bermasalah ( Macet )**

<b>Tahun</b>	<b>Pertanian</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Konsumtif</b>	<b>Lain-lain</b>
2002	6	4	5	2
2003	8	6	3	-
2004	-	1	3	-
2005	1	1	3	1
2006	2	-	5	2
Jmlh	17	12	19	5

Sumber data : Laporan Kolektibilitas BRI Tahun 2007

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah yang disalurkan ke bidang usaha pertanian dari tahun 2002 – 2006 sebesar 17 kasus, bidang usaha perkebunan sebanyak 12 kasus, bidang usaha konsumtif sebesar 19 kasus, dan lain-lain sebesar 5 kasus.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kredit bermasalah / macet yang paling tinggi pada sektor konsumtif, seperti yang dikemukakan oleh *Sutrisno* ( bagian kredit ) yaitu untuk keperluan usaha-usaha yang bersifat konsumtif untuk umum dan khusus, misalnya usaha-usaha yang bergerak pada sektor kebutuhan pokok ( beras dan palawija ), sandang ( pakaian ) dan papan ( rumah ).

Pengguna kredit untuk usaha ini tidak jarang terjadi justru memanfaatkan kredit tersebut untuk keperluan yang bersifat insidental dan tidak mendasar / tidak mempunyai prospek kedepan misalnya pembelian kendaraan secara berlebih ( lebih dari satu untuk menunjang usaha, yang justru tidak efektif dan efisien mengingat daerah-daerah di sekitar Temanggung tidaklah terlalu luas dan mudah dijangkau. Dari segi konsumtif sendiri / pribadi, yaitu untuk pembelian rumah, tanah dan bangunan yang tidak diperlukan dan hanya dibuat sekedar investasi, sering mengakibatkan kredit macet pada bidang usaha ini.

Dari sektor riil lainnya, seperti usaha perbengkelan dan alat-alat pertanian, sering kali tidak diprediksikan dengan kondisi dan kultur / budaya masyarakat Temanggung pada umumnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh *Andang* ( nasabah / debitur kredit macet ), pemilihan usaha dan disertifikasi usaha untuk daerah Temanggung sering tidak tepat sasaran, sebagai contoh, usaha perbengkelan untuk kendaraan bermotor, dalam usaha ini secara riil akan kalah bersaing dengan perbengkelan yang dikelola / dibuka oleh agen-agen resmi perusahaan kendaraan bermotor tersebut sebagai upaya menarik pembeli dengan servis sesudah pembelian (*service after sales*) dan penjualan alat alat pertanian yang tidak tepat karena para petani di daerah Temanggung pada umumnya mengerjakan / menggarap tanah pertanian dengan memakai cara / cara dan alat-alat yang tradisional dan tidak membutuhkan biaya banyak.

Disamping itu dalam aspek pemasaran juga menjadi penyebab terjadinya kredit macet, misalnya kesulitan pemasaran akibat kejenuhan pangsa pasar akibat banyaknya produk yang sama dengan harga yang bersaing, tidak terjualnya produk hasil usaha karena kondisi keuangan secara umum ( resesi ).

Adapun yang dimaksud dengan usaha lain dalam tabel ini adalah usaha- usaha toko / kelontong / grosir bahan makanan dan pakaian, yang biasanya dilakukan dengan membuka usaha toko yang tidak dilakukan secara profesional, yaitu pembukuan / pengelolaan administrasi secara tradisional dalam hal pembukuannya, dimana tidak dilakukan pemisahan antara manajemen usaha dengan manajemen rumah tangga akhirnya debitur tidak dapat membayar hutang bank secara bertahap / berkala.

**Tabel III**  
**Profil Profesi / Pekerjaan Debitur**

<b>Tahun</b>	<b>Pegawai Negeri</b>	<b>Pegawai swasta</b>	<b>Wiraswasta</b>	<b>Lain-lain</b>
2002	2	1	13	1
2003	4	5	8	-
2004	-	1	3	-
2005	1	-	5	-
2006	2	-	7	-
Jmlh	9	7	36	1

Sumber data : Laporan Kolektibilitas BRI Tahun 2007

Dari tabel III dapat dijabarkan mengenai profil pekerjaan / status Debitur / Nasabah yang mempunyai kredit bermasalah ( *non performing loan* ) antara lain : (1) Pegawai Negeri sebanyak 9 orang, kredit macet digunakan untuk keperluan pembelian rumah dan kendaraan; (2) Pegawai Swasta sebanyak 7 orang, yang menggunakan kredit untuk pembelian rumah, kendaraan dan membuka usaha sampingan; (3) Wiraswasta sebanyak 36 orang, untuk keperluan usaha baik berupa toko kelontong / bahan pokok, mainan, pakaian, salon dan pendidikan non formal / kursus; (4) yang tidak mempunyai profesi tetap sebanyak 1 orang, penggunaan untuk tambahan modal usaha berjualan makanan / warung / restoran .

**Tabel IV**

**Bentuk Penyelesaian Kredit Macet**

Tahun	Bentuk Penyelesaian Kredit Macet Yg Telah dilakukan BRI Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006								
	Restrukturisasi				Damai		Lembaga Peradilan		Tidak Tertagih
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
2002	3	4	1	4	2	3	-	-	Nihil
2003	2	5	4	3	1	1			1
2004	-	-	2	-	2	-	-	-	-
2005	-	-	4	1	1	-	-	-	-
2006	2	2	1	-	2	-	1	1	-
Jmlh	7	11	12	8	8	4	1	1	1

Sumber data : Laporan Kolektibilitas BRI Cabang Temanggung Tahun 2007

**Keterangan :**

- a) Penurunan suku bunga kredit
- b) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d) Pengambil alihan asset debitur
- e) Penjualan aset oleh debitur
- f) Penjualan aset oleh Bank sebagai kuasa
- g) Penyerahan ke BUPLN
- h) Gugatan melalui PN
- i) Tidak tertagih / Debitur melarikan diri

Dari tabel IV diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah ( *non performing loan* ) yang dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung dari tahun 2002 – tahun 2006 dengan menggunakan cara Restrukturisasi ( penurunan suku bunga tercatat sebesar 7 kasus, pengurangan tunggakan bunga kredit sebanyak 11 kasus, pengurangan tunggakan pokok sebanyak 12 kasus, dan pengambil alihan asset debitur sebanyak 8 kasus ). Sedangkan kebijakan penyelesaian secara damai ( penjualan aset dibawah tangan oleh debitur sebanyak 8 kasus, penjualan aset oleh Bank dengan kuasa sebanyak 4 kasus ). Adapun kasus kredit bermasalah yang diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu ( penyerahan ke BUPLN/PUPN sebanyak 1 kasus, dan melalui

gugatan ke Pengadilan Negeri sebanyak 1 kasus ). Sedangkan 1 kasus tidak dapat diselesaikan karena debitur melarikan diri dan barang jaminan tidak dapat dieksekusi karena tidak memenuhi sebagai Hak Tanggungan dan belum adanya *Grosse Akta*.

## **B. Pembahasan**

### **1) Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Kredit Macet Di BRI Cabang Temanggung**

Dari data-data tabel diatas besarnya jumlah kredit bermasalah / non performing loan yang terjadi di BRI Cabang Temanggung antara lain disebabkan :

#### **a. Penggunaan Kredit Tidak Sesuai Dengan Tujuan Penggunaannya**

Hal ini sering terjadi bahkan menurut *Bambang Dwianto* ( Supervisor Administrasi Kredit dan Pengawasan Kredit wawancara dilakukan tanggal 5 Maret 2007 ), biasanya kredit yang disalurkan tidak digunakan sebagaimana tujuan pemberiannya misalnya pemakaian kredit yang menyimpang misalnya kredit untuk pertanian tembakau tetapi digunakan untuk disertifikasi usaha yang lain jual beli pupuk atau bahan-bahan pertanian atau untuk usaha sampingan yang lain dan bahkan digunakan untuk keperluan yang konsumtif. Oleh karena tidak mempunyai pengalaman di bidang yang lain ini maka Debitur akhirnya bangkrut dan tanaman tembakau belum dapat menghasilkan sehingga Debitur tidak dapat mencukupi angsuran pengembalian pokok dan bunga pinjaman setiap bulannya. Hal yang sama dikemukakan oleh *Sutrisno* ( bagian kredit, tanggal 5 Maret 2007 ) memang setelah penanaman tembakau sudah selesai pada umumnya petani kemudian menggunakan sisa pinjaman kredit tersebut untuk usaha sampingan yang lain, dengan harapan bahwa dari usaha ini dapat diperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk mengangsur cicilan pinjaman dan bunga setiap bulannya. Dilakukannya hal ini disebabkan masih adanya sisa pinjaman kredit yang masih ada dan daripada tidak digunakan maka sementara digunakan untuk usaha lainnya.

Lain lagi yang dikemukakan oleh *Mujiarto* ( debitur, wawancara tanggal 11 Maret 2007 ), pengambilan kredit tersebut disamping untuk keperluan pertanian, juga digunakan untuk keperluan keluarga yang lainnya, misalnya untuk biaya sekolah anaknya dan sebagainya. Hal ini memang kerap dilakukan karena sesuai dengan perhitungan hasil panen yang didapat nantinya akan cukup untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada bank. Yang penting baginya dapat mencukupi keperluan keluarga dan sebagai biaya penggarapan lahan pertanian miliknya..

*Hartono* ( debitur, wawancara tanggal 11 Maret 2007 ) menggunakan kredit yang diambil dari Bank memang digunakan sesuai dengan tujuan pengambilan kredit, tetapi disisi yang lain uang tersebut juga dipergunakan untuk usaha lain / diversifikasi usaha yang dapat menguntungkan dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan karena usaha yang semula dajukan terkadang mengalami pasang surut sehingga dengan pengalihan usaha yang lainnya diharapkan akan mampu menunjang atau menutupi usaha semula. Memang diperlukan adanya manajemen yang baik, karena jika tidak bukan tidak mungkin usaha-usaha tersebut akan bangkrut yang



mengakibatkan tidak dapat dikembalikan beban kredit / kredit macet. Terkadang usaha lain tersebut bersifat spekulatif / untung-untungan karena manajemen usaha semula pasti pengelolaannya tidak sama dengan usaha yang lain.

#### **b. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usahanya**

Pada umumnya hal ini terjadi pada nasabah / debitur pemula, yang bersifat mencoba / spekulatif membuka usaha baru. Sehingga disamping kurangnya pengalaman dalam bidang usahanya tersebut, juga tidak bisa mengelola manajemen terutama keuangan. Atau adanya kemungkinan mis manajemen dalam pengelolaan usahanya. Hal ini dikemukakan oleh *Iwan Sugandha* ( debitur ) yang mengatakan bahwa usaha yang baru dirintisnya gagal total disebabkan karena ketidak tahuannya terhadap usahanya dan hanya percaya / pasrah kepada orang lain untuk mengelola manajemen usahanya tersebut. Kesalahan pengelolaan usaha memang sering terjadi seperti yang dikatakan oleh *Saiful* ( pengawas kredit, tanggal 17 April 2007 ), pada umumnya kesalahan tersebut disebabkan ketidak tahuan / ketidak fahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, misalnya membuka usaha alat-alat pertanian padahal daerah ini adalah daerah pertanian tradisional sehingga jual beli alat-alat pertanian yang dirintisnya tidak ada yang membeli. Bahkan ada yang membuka usaha perbengkelan padahal debitur sama sekali belum berpengalaman dibidang itu, atau membuka usaha pengangkutan padahal pengalaman yang dimilikinya adalah dalam bidang pertanian. Lain halnya yang dialami oleh *Andang* ( debitur, tanggal 10 April 2007 ) yang berpengalaman dalam bidang konstruksi bangunan tetapi oleh karena melambungny harga-harga bangunan terutama besi dan kesalahan dalam penghitungan bahan maka usaha yang dirintisnya akhirnya bangkrut.

Menurut *Basuki* ( nasabah / debitur bermasalah, tanggal 24 April 2007 ) yang menjadi faktor penyebab adanya kredit macet antara lain juga disebabkan tidak / kurangnya kejelian dalam aspek pemasaran barang, baik mengenai mutu, model dan desain rendah dan tidak disukai, disisi lain pelayanan perusahaan kurang dan tidak adanya servis setelah penjualan ( *after sales service* ). Disisi lain dapat terjadi karena aspek pengaturan keuangan dimana perusahaan yang terlalu banyak memakai modal dari luar sehingga pada jatuh tempo pembayaran bunga menjadi lebih tinggi / terlalu besar sehingga mengganggu likuiditas atau rentabilitas perusahaan. Disamping itu terkadang perusahaan terlalu banyak mengadakan investasi tetap seperti gedung, pabrik, tanah dan sebagainya ( *over investment* ) sehingga mengakibatkan terganggunya likuiditas dan menekan rentabilitas karena dana tertanam pada aktiva yang tidak diperlukan.

#### **c. Nasabah Memang Beritikad Tidak Baik**

Nasabah yang demikian ini memang tidak banyak jumlahnya, seperti yang dikatakan oleh *Sutrisno* ( Bagian Kredit ), memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh nasabah yang demikian ini, dimana pada akhir jatuh tempo pelunasan tidak bertanggung jawab atau bahkan menghilang. Untuk menganalisa watak nasabah yang demikian ini sangat sulit dilakukan

karena baik penampilan, usaha yang akan dikerjakan mempunyai prospek yang bagus, jaminan / tanggungan memadai dan lebih besar daripada nilai kredit yang diajukan. Memang secara perhitungan Bank tidak dirugikan karena adanya jaminan yang dianggunkan, sehingga tanggungan / jaminan tersebut dapat dijual / dilelang sebagai pengganti kredit yang diambilnya. Akan tetapi yang menjadi kendala dilapangan, pengambil alihan dan penjualan aset debitur harus melewati prosedur yang cukup memakan waktu, disamping itu jaminan / tanggungan tersebut tidak segera dapat laku dijual. Akibatnya aset-aset Bank menjadi terhenti dan tidak dapat segera disalurkan kepada debitur / nasabah yang lain, sehingga secara hitungan financial bank tetap mengalami kerugian, apalagi jaminan / tanggungan tersebut tidak segera laku dijual atau terpaksa dijual di bawah harga.

#### **d. Tidak Diterapkan Sistem Kehati-hatian Dan Prinsip-prinsip Perbankan Yang Sehat Dalam Pemberian Kredit**

Bank dalam hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kredit macet antara lain tidak diterapkannya / tidak dipatuhinya prinsip-prinsip perbankan yang sehat dalam penyaluran kredit. Hal ini dikatakan oleh *Dede Supriatna* ( Pimpinan Cabang BRI ), meskipun kecil jumlahnya maka tidak ditutupi bahwa terkadang kesalahan itu terjadi pada pihak kreditur ( Bank ) dimana Bank melakukan analisa / penilaian yang keliru / tidak tepat pada nasabah / debitur antara lain terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha debitur. Sebenarnya kesalahan ini bukanlah mutlak dilakukan oleh Bank itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh *Suryono Bambang Wijarnako* ( Offisier Kredit ), tetapi ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya baik itu bersifat internal maupun eksternal antara lain adanya persaingan antar bank dalam penyaluran kredit. Hal ini dapat dipahami karena sejak tahun 2000 dengan adanya kebijakan Bank Indonesia mengenai kemudahan penyaluran kredit lunak ( *credit loan* ) mau tak mau ada / timbul persaingan Bank dalam memberikan kemudahan dan fasilitas yang lebih kepada para nasabahnya. Sehingga terjadi tidak diterapkannya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tersebut, biasanya yang diprioritaskan / diukur adalah adanya tanggungan / jaminan yang nilainya melebihi jumlah kredit yang disalurkan. Hal ini dianggapnya bahwa Bank mempunyai jaminan yang dapat dijual kembali apabila nasabah tersebut tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Faktor internal yang lain sebagai penyebab kredit macet adanya hubungan baik yang sudah terjalin lama antara bank ( kreditur ) dan nasabah ( debitur ) sehingga pemberian kredit pada umumnya dilakukan atas dasar kepercayaan, dan bank cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dan atau persyaratan pemberian / penyaluran kreditnya. Dikemukakan oleh *Bambang Dwianto* ( Supervisor Administrasi Kredit ), dalam hubungan ini bank dalam melayani kepentingan nasabah ini cenderung lebih mudah, terkadang proyek yang dibiayai kurang begitu menguntungkan / tidak mempunyai prospek yang bagus tetapi karena adanya hubungan baik biasanya Bank terus membantu apabila ada kesulitan nasabahnya itu.

Disisi yang lain kesalahan juga terjadi dalam melakukan analisa jaminan / anggunan yang diberikan oleh nasabah, hal ini dikemukakan oleh *Irwan Hutapea* ( Bidang Pengawasan Bank Indonesia Wilayah IV Jogjakarta ), sering dilupakan terutama para analisis kredit yaitu nilai jaminan / anggunan yang diberikan oleh nasabah antara lain nilai jaminan berbentuk rumah atau tanah harusnya dibedakan letak / lokasinya misalnya jaminan yang diagunkan lokasinya di kota kecil dan ada kemungkinan sulitnya laku untuk dijual / dilelang kembali. Hal inilah yang menyebabkan asset Bank terutama di kota-kota kecil menjadi bertambah dalam bentuk asset yang diklasifikasikan sebagai asset mati, sedangkan bank akan selalu kekurangan asset dalam bentuk dana segar / *cash flow* .

Disisi yang lain terkadang Bank juga kurang teliti didalam penyaluran kredit kepada nasabah, terutama pada jaminan kebendaan antara lain tidak mengikatnya secara khusus misalnya dengan Hak Tanggungan ( HT ), gadai atau Fiducia. Akibatnya Bank hanya memegang perjanjian kredit dan dokumen atas jaminan seperti sertifikat atas tanah, yang berakibat Bank tidak dapat segera mengeksekusi barang jaminan tersebut dan harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kebijakan pemberian kredit kepada nasabah berupa piutang dagang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dana likuid ( uang ) misalnya jangka waktu piutang yang terlalu lama ( *turn over* ) menjadi terlalu lambat akan dapat mengakibatkan likuiditas dengan segala macam kesulitan yang ditimbulkannya.

#### **e. Adanya Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Riil**

Faktor diluar nasabah / debitur yang dapat menyebabkan kredit macet yaitu adanya kebijakan pemerintah misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak, yang mendorong naiknya biaya produksi. Sehingga diperlukan waktu bagi perusahaan untuk penyesuaian kondisi yang memakan waktu lama / tidak segera. Tidak jarang perusahaan masih tetap berjalan dengan kondisi lama atau tidak dapat melakukan penyesuaian karena pangsa pasar yang sama. Disisi yang lain juga dapat disebabkan adanya peraturan pemerintah dalam rangka peremajaan alat-alat produksi ( *scrapping* ) sehingga mau tidak mau perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan penggantian. Menurut *Bambang* ( *Officer Credit* ), kenaikan harga BBM ini yang menyebabkan para debitur / nasabah menjadi panik, dan berusaha untuk segera menstabilkan harga jual produksi mereka. Meskipun demikian dampak kenaikan BBM ini sangat mempengaruhi dan memacu peningkatan kebutuhan pokok mereka, misalnya naiknya harga pupuk, bahan bangunan terutama besi, sampai pada ongkos angkut hasil produksi, sehingga nasabah / debitur tidak dapat begitu cepat mengadakan penyesuaian harga produksi mereka. Apalagi sudah terikat dengan kontrak / perjanjian sebelumnya dengan harga yang lama, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mengkondisikan / menstabilkan harga, terutama yang berkaitan langsung dengan pihak ketiga.

Devaluasi atau menurunnya rupiah dapat mengakibatkan kenaikan harga, terutama pada perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan barang impor sebagai bahan baku. Hal

ini menyebabkan perusahaan kekurangan modal kerja Hal ini terjadi terutama bagi usaha-usaha perbengkelan, jasa *manufacture*, desain dan konstruksi. Disamping itu adanya Revaluasi atau naiknya nilai rupiah akan mengakibatkan penerimaan rupiah para eksportir menurun, menurut Bambang ( Analisis Kredit ) artinya dalam keadaan yang demikian debitur / nasabah bisa mengalami kekurangan rupiah untuk mendapatkan barang yang akan diekspor, sehingga menimbulkan kekurangan likuiditas yang pada akhirnya memperkecil volume usaha. Hal ini terjadi terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit dan tembakau.

**f. Adanya / Timbulnya Bencana Alam**

Hal ini sangat membutuhkan dana segar untuk merehabilitasi perusahaan dari kerusakan karena bencana alam, misalnya gempa bumi tahun 2006 yang lalu, banjir yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan perkebunan atau infrastruktur yang lainnya.

**2. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh BRI Cabang Temanggung Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Sesuai Dengan SE BI Nomor 26/4/BPPP dan PP Nomor 33 / 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah.**

Untuk mengurangi resiko yang timbul dari pemberian kredit atau pembiayaan, maka diperlukan penanganan secara maksimal terhadap kredit bermasalah ( *non performing loan* ). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah antara lain :

- a. Melalui *rescheduling* ( penjadwalan kembali ), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali / jangka waktu kredit termasuk tenggang ( *grace period* ), termasuk perubahan jumlah angsuran, dan bila perlu dengan penambahan kredit. Kebijakan ini dapat diberikan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
- b. Melalui *reconditioning* ( persyaratan kembali ), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Bantuan yang dapat diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain : (a) kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. (b) Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan, dan atas bunga yang terutang kredit tersebut tidak

dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit. (c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. (d) Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya ataupun seluruh utang bunga. (e) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

- c. *Restructuring* ( penataan kembali ), yaitu upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut maka dalam ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan sebagai berikut :

“ Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula : ..... melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia “

Selanjutnya dalam bagian penjelasannya dikatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- 1) Penyertaan modal sementara oleh Bank yang berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan,
- 2) Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal,
- 3) Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila : telah melebihi jangka waktu paling lama 5 tahun atau perusahaan telah memperoleh laba,
- 4) Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari negara bank, apabila dalam angka waktu paling lama 5 ( lima ) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya,
- 5) Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta penjelasannya, menunjukkan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah oleh debitur, maka kegagalan kredit atau pembiayaan itu oleh bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara oleh bank yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun atau perusahaan / debitur tersebut telah memperoleh laba.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh BRI Cabang Temanggung dalam menyelesaikan kredit macet mengacu pada ketentuan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tertanggal 12 Nopember 1998 sebagai berikut :

#### a. Restrukturisasi

Merupakan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama ( kooperatif ) dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali.

##### 1) Penurunan Suku Bunga Kredit.

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringan kepada Debitur, sehingga dengan penurunan bunga kredit maka besarnya bunga yang harus dibayar menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya. Hal ini dikemukakan oleh *Dede Supriatna* ( Pimpinan BRI Cabang Temanggung ) yang mengatakan bahwa dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan hasil usaha dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya dapat digunakan untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Rata-rata penurunan suku bunga tersebut berkisar antara 10 % per tahun, sehingga yang semula bunga kredit ditetapkan sebesar 20 % per tahun menjadi hanya 10 % per tahunnya. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perhitungan *cash flow* atas usahanya dapat diprediksikan Debitur mampu menyelesaikan seluruh hutangnya.

Tindakan penurunan suku bunga kredit ini sangat membantu nasabah / debitur dalam melunasi hutangnya, seperti yang disampaikan oleh *Ika Mahendra* ( nasabah / debitur ), kebijakan penurunan suku bunga kredit ini sangat membantu usahanya karena memang untuk beban suku bunga kredit yang semula dirasakan berat. Tetapi dengan adanya penurunan suku bunga kredit masih ada sisa bunga yang tidak perlu disetorkan dan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Bahkan diperoleh kebijakan dari bank, nasabah dapat mengangsur beban bunga saja setiap bulannya tanpa harus mengangsur pinjaman pokoknya.

Adapun teknis daripada tindakan ini adalah memperbaharui akta-akta yang telah dibuat sebelumnya dengan melakukan amandemen atau addendum terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang besarnya suku bunga kredit. Hal ini disampaikan oleh *Suryono Bambang Wijanarko* ( Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Temanggung ), yang menyebutkan bahwa amandemen atau *addendum* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit terdahulu / lama. Sehingga semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku misalnya perjanjian pengikatan jaminan dan addendum ini dapat dibuat dibawah tangan ( dibuat oleh para pihak ) Ada kemungkinan dengan addendum penurunan suku bunga tersebut maka pihak Kreditur ( Bank ) memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang ada.

##### 2) Pengurangan atau Penghapusan Tunggakan Bunga Kredit

Pada umumnya salah satu indikasi kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari 3 ( tiga ) kali pembayaran, sehingga bunga kredit lama kelamaan

menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok. Untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini maka Bank BRI Cabang Temanggung mengambil langkah dengan pengurangan atau penghapusan seluruh atau sebagian tunggakan bunga kredit. Tindakan ini dilakukan untuk memperingan beban Debitur sehingga diharapkan dapat kembali melanjutkan usahanya dan membayar hutang pokoknya. Hal ini dikatakan oleh *Widianto* (Offisier Kredit) secara teknis kebijakan ini diberikan kepada Debitur / Nasabah yang dinilai secara cermat hanya melakukan kesalahan manajemen dan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga dapat diprediksikan Debitur akan mampu mengembangkan usahanya kembali. Misalnya tunggakan bunga selama 3 bulan sebesar 400 juta rupiah, maka kepada Debitur dilakukan pengurangan atau penghapusan seluruh hutang bunganya tersebut. Meskipun demikian tindakan pengurangan dan atau penghapusan tunggakan bunga kredit ini dilakukan secara selektif dan melalui analisis yang cukup ketat. Pengurangan dan atau penghapusan seluruh atau sebagian tunggakan bunga tersebut tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar oleh Debitur.

### 3) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Hal ini merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh Bank BRI Cabang Temanggung, karena pengurangan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda secara keseluruhan. Hal ini disampaikan oleh *Sutrisno* (Kepala Bagian Kredit BRI), pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan Bank BRI yang sangat besar karena asset Bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban Bank BRI. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan berbarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Untuk keperluan tersebut dibuat akta addendum perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi. Selain menggunakan *instrument addendum* pengurangan pokok kredit, dilakukan juga dengan Surat Direksi BRI yang ditujukan kepada Debitur / Nasabah yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit terdahulu.

### 4) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit.

Kebijakan atau tindakan penyelamatan kredit macet lain yang dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Tindakan ini dimaksudkan agar kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dan dengan memperpanjang waktu memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya. Kebijakan atau langkah yang diambil ini menurut *Bambang* (Bagian Kredit), selama ini lebih efektif dalam pemecahan

masalah kredit macet, karena biasanya dengan adanya perpanjangan waktu pembayaran kredit di Debitur merasa tertolong dengan pembayaran yang sudah jatuh tempo harus dibayar dapat dipergunakan untuk memperkuat usahanya, misalnya pembayaran hutang seluruhnya jatuh tempo pada bulan Januari tahun 2003 diperpanjang menjadi Januari 2004.

5) Pengambil alihan agunan / asset debitur

Kebijakan lain yang diterapkan oleh BRI Cabang Temanggung adalah dengan cara mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan dikompensasikan dengan jumlah kredit yang diambil. Hal ini dikemukakan oleh *Sutrisno* ( bagian kredit ), hal ini terpaksa dilakukan karena menurut evaluasi yang dilakukan oleh Bank, kreditur melakukan wanprestasi yang tidak mungkin dapat melunasi hutangnya sesuai dengan jatuh tempo perjanjian kredit meskipun telah dilakukan berbagai cara restrukturisasi hutangnya. Dengan kata lain cara ini dilakukan sebagai upaya damai terakhir dalam penyelamatan kredit setelah upaya-upaya lain tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengambil alihan aset ini

6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur.

Hal ini dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik, mempunyai prospek usaha yang menjanjikan. Hal ini tidak menyimpang dari aturan yang ada, karena menurut *Dede Supriatna* ( Pimpinan Cabang BRI ) ketentuan ini diatur dalam Surat dari BI Nomor 25 /1/BPPP jo Surat Keputusan Direksi BI Nomor 25/97/KEP/DIR tentang penyertaan modal dan pemilikan saham Untuk kebijakan ini BRI Cabang Temanggung melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak antara lain sebagai berikut : melakukan penilaian / analisis terhadap perusahaan debitur dengan mensyaratkan bahwa perusahaan debitur memiliki asset yang lebih besar daripada hutangnya, perusahaan debitur memiliki prospek usaha yang baik, penyertaan modal dilakukan dengan pembelian saham perusahaan dengan menjadikannya Bank sebagai pemegang saham mayoritas. Hal ini dilakukan agar Bank dapat mengangkat / memilih dan melakukan pengawasan yang lebih pada manajemen pengelolaan perusahaan tersebut.

## **b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Damai**

Selain kebijakan restrukturisasi tersebut diatas, maka Bank BRI Cabang Temanggung juga mengambil langkah dalam menyelesaikan kredit secara damai, khususnya terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik ( kooperatif ) untuk menyelesaikan kewajibannya antara lain sebagai berikut :

1) Penjualan sebagian atau seluruh anggunan / jaminan di bawah tangan oleh debitur.

Kebijakan ini sering dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung karena hal ini memudahkan untuk pengembalian hutang-hutang debitur. Disamping itu cara ini dapat lebih menghemat waktu, biaya dan hasilnya akan lebih baik daripada penjualan lelang. Hal ini dikatakan oleh *Sutrisno* ( Kepala Bagian Kredit ), cara demikian ini sangat efektif dan efisien karena tidak lagi memerlukan prosedur yang panjang dan hasilnya dapat lebih tinggi



daripada harga pasaran yang ada pada saat itu. Bank lebih dominan untuk mengatur hasil penjualan jaminan ini, sehingga hasil penjualan tersebut langsung disetor ke Bank untuk pembayaran hutang debitur. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka penjualan diluar lelang / dibawah tangan dapat dilakukan.

Menurut Royan ( nasabah / debitur ), dalam pelaksanaan kebijakan ini memang kedudukan debitur sangat lemah karena penjualan tersebut secara langsung dikontrol dan diawasi oleh bank / kreditur, tetapi disisi yang lain sisa hasil penjualan dibawah tangan ini lebih banyak diperoleh oleh debitur setelah dipotong tunggakan kredit, tidak adanya biaya administrasi dan dapat dimanfaatkan langsung oleh debitur untuk membuka usaha yang lain.

2) Penjualan Barang Jaminan Dibawah Tangan Oleh Bank Berdasarkan Surat Kuasa.

Kebijakan ini diambil apabila debitur kesulitan atau tidak mampu menjual sendiri barang jaminan / anggunan untuk melunasi hutang-hutangnya. Akan tetapi menurut Suryono ( Offisier ), hal ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam prakteknya karena adanya kekhawatiran pihak PPAT dalam membuat akta jual beli barang jaminan di bawah tangan dengan surat kuasa dan tanpa dihadiri oleh debitur .Kekhawatiran ini dapat dipahami karena dalam penjualan tersebut dikhawatirkan harga yang ditawarkan oleh pihak kuasa lebih kecil daripada yang dikehendaki oleh Debitur, yang dapat mengakibatkan kerugian pada debitur dalam pelunasan hutang-hutangnya. Seperti yang dikatakan oleh Sampurno ( Nasabah / Debitur ), memang cara ini lebih praktis karena debitur tidak lagi dibebani kewajiban yang tidak mudah itu, tetapi disisi lain nasabah / debitur merasa tidak puas apabila hasil penjualan itu terlalu kecil dan tidak dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya sehingga masih adanya kewajiban lagi yang dibebankan kepada debitur. Hal yang demikian ini bukan tidak mungkin terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak kuasa dengan berkolusi dengan pihak lain, atau bahkan membeli sendiri jaminan / anggunan tersebut dengan harga yang murah.

**c. Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-Lembaga Hukum**

Upaya terakhir dari BRI Cabang Temanggung untuk menyelesaikan kredit bermasalah ( *non performing loan* ) adalah dengan cara melalui lembaga hukum sebagai berikut :

1) Penyerahan ke BUPLN / PUPN/ DJKN / KPKNL / Panitia Urusan Piutang Negara / Daerah.

Penyerahan pengurusan piutang / kredit macet ke BUPLN / PUPN, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK.01/2000 jo Nomor 376 /KMK.01/1998 dan SK Kepala BUPLN Nomor 38 /PN/2000 dan PP Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah.

Menurut *Dede Supriatna* ( Pimpinan BRI ) mengatakan penyerahan kredit / piutang yang macet ke BUPLN / PUPN yang disebabkan adanya penyalahgunaan oleh debitur atau penanggung hutang. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah, maka Pengurusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c/q Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara.

2) Melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit macet melalui gugatan ke Pengadilan Negeri ditempuh dengan cara :

- a) Somasi / Peringatan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri
- b) Mengajukan pelaksanaan fiat eksekusi / eksekusi *grosse akte* / hipotik / *Credit Verband*, Hak Tanggungan, kepada Ketua Pengadilan Negeri terutama untuk jaminan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan ( HT ). Sebagai contoh yaitu terhadap debitur ( *Endra Wijaya* ) dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Temanggung No. 02/Pdt Eks HT/2008/PN Tmg dan No. 04/ Pdt.Eks.Hip/2007/PN Tmg, tgl 3 April 2007.
- c) Atas barang-barang jaminan kredit yang diikat secara fidusia dilakukan dengan cara mengajukan *revindicatoir beslag* melalui prosedur gugatan ke PN. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah dan menghindarkan tindakan yang mungkin dilakukan oleh debitur misalnya penggelapan, penjualan dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai atau harga barang jaminan.
- d) *Conservatoir beslag* terhadap seluruh harta kekayaan debitur / penanggung jawab baik yang diikat maupun yang belum / tidak diikat.
- e) Mengajukan gugatan sebagai perkara perdata biasa, apabila barang jaminan belum mempunyai bukti kepemilikan yang sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani dengan hak tanggungan. Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada Debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif, hal ini disampaikan oleh *Dede Supriatna* ( Pimpinan Cabang BRI ), karena disamping memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang diperlukan untuk memproses gugatan sampai pada keputusan memakan waktu yang lama, belum lagi Debitur mengajukan upaya hukum banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Pada kasus yang terjadi di BRI Temanggung untuk gugatan tersebut memerlukan waktu paling cepat sampai 6 tahun. Demikian juga biaya yang dibutuhkan juga mahal, mengingat untuk keperluan pengajuan gugatan ini Bank terpaksa harus menggunakan jasa Penasihat Hukum / Advokad, belum lagi biaya-biaya resmi ataupun tidak resmi dalam proses persidangan perkara gugatan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh *Dwi Supriyono* ( Advokad / Penasihat Hukum ), untuk pembiayaan gugatan terhadap

seorang debitur memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena disamping adanya biaya-biaya resmi, ada juga biaya-biaya yang tidak resmi yang terpaksa harus dibayarkan untuk memperlancar sidang gugatan tersebut. Lebih lagi jika sudah masuk pada pelaksanaan eksekusinya, memerlukan tenaga-tenaga dari berbagai pihak untuk mengawal dan melaksanakan eksekusi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Demikian juga tenaga yang dibutuhkan sangat menyita waktu kerja karena harus bolak balik menghadiri sidang, apalagi jika sidang yang diundur ataupun ditunda. Akan tetapi gugatan kepada Debitur terpaksa dilakukan dilakukan, seperti yang dikatakan oleh *Bambang Widiyanto* ( Offisier Administrasi Kredit ), karena pada kenyataan di lapangan ditemukan bahwa Kreditur tidak memegang jaminan kebendaan secara khusus yang telah diikat secara khusus seperti hak tanggungan atau gadai atau fiducia.

- f) Penyelesaian dengan bantuan Pihak Ketiga ( Kejaksaan Negeri dan Pengajuan Klaim Asuransi ).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka faktor-faktor penyebab kredit macet dan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Temanggung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah ( *non performing loan* / kredit macet ) antara lain disebabkan karena :
  - a. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya., dimana tujuan pemberiannya kredit digunakan untuk disertifikasi usaha yang lain, atau untuk keperluan yang konsumtif. Terkadang usaha lain tersebut bersifat spekulatif / untung-untungan karena manajemen usaha semula pasti pengelolaannya tidak sama dengan usaha yang lain.
  - b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya disebabkan kurangnya pengalaman dalam bidang usahanya tersebut, juga disebabkan ketidaktahuan / ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya
  - c. Nasabah memang beritikad tidak baik, dimana pada akhir jatuh tempo pelunasan tidak bertanggung jawab atau bahkan menghilang.
  - d. Tidak diterapkan sistim kehati-hatian dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dalam pemberian kredit oleh Bank, dimana Bank melakukan analisa / penilaian yang keliru / tidak tepat pada nasabah / debitur antara lain terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha debitur.
  - e. Adanya Kebijakan pemerintah dalam sektor riil, yaitu adanya kebijakan pemerintah misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak, yang mendorong naiknya biaya produksi. Disisi yang lain juga dapat disebabkan adanya peraturan pemerintah dalam rangka peremajaan alat-alat produksi ( *scrapping* ). Devaluasi atau Revaluasi yang mengakibatkan menurunnya / naiknya rupiah dapat mengakibatkan kekurangan likuiditas dan akhirnya memperkecil volume usaha.
  - f. Adanya / akibat timbulnya bencana alam misalnya gempa bumi tahun 2006 yang lalu, banjir yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan perkebunan atau infrastruktur yang lainnya.
2. Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah / kredit macet ( *non performing loan* ) oleh BRI Cabang Temanggung dengan berlakunya Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR dan PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah . antara lain dilakukan dengan cara :
  - (1) Penurunan Suku Bunga Kredit dengan memberikan keringan kepada Debitur, sehingga dengan penurunan bunga kredit maka besarnya bunga yang harus dibayar menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya.. Rata-rata

penurunan suku bunga tersebut berkisar antara 10 % per tahun, sehingga yang semula bunga kredit ditetapkan sebesar 20 % per tahun menjadi hanya 10 % per tahunnya. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perhitungan cash flow atas usahanya dapat diprediksikan Debitur mampu menyelesaikan seluruh hutangnya.

- (2) Pengurangan atau Penghapusan tunggakan yaitu mengambil langkah dengan pengurangan atau penghapusan seluruh atau sebagian tunggakan bunga kredit.
- (3) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit meskipun pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan Bank BRI yang sangat besar karena asset Bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban Bank BRI. .
- (4) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, misalnya pembayaran hutang seluruhnya jatuh tempo pada bulan Januari tahun 2003 diperpanjang menjadi Januari 2004.
- (5) Pengambil alihan agunan / aset debitur yaitu dengan cara mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan dikompensasikan dengan jumlah kredit yang diambil.
- (6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur. Hal ini dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik, mempunyai prospek usaha yang menjanjikan.
- (7) Penjualan sebagian atau seluruh anggunan / jaminan di bawah tangan oleh debitur. Kebijakan ini sering dilakukan oleh BRI Cabang Temanggung karena hal ini memudahkan untuk pengembalian hutang-hutang debitur. Disamping itu cara ini dapat lebih menghemat waktu, biaya dan hasilnya akan lebih baik daripada penjualan lelang.
- (8) Penjualan Barang Jaminan Dibawah Tangan Oleh Bank Berdasarkan Surat Kuasa. Kebijakan ini diambil apabila debitur kesulitan atau tidak mampu menjual sendiri barang jaminan / anggunan untuk melunasi hutang-hutangnya.
- (9) Penyerahan piutang ke BUPLN / PUPN/ Panitia Urusan Piutang Perusahaan Negara /Daerah  
 Penyerahan pengurusan piutang / kredit macet ke BUPLN /PUPN/ Panitia Urusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah , hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK.01/2000 jo Nomor 376/KMK.01/1998 dan SK Kepala BUPLN Nomor 38 /PN/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- (10) Mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri ditempuh dengan cara : (a) Mengajukan pelaksanaan eksekusi grose akte kepada Ketua Pengadilan Negeri terutama untuk jaminan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan ( HT ); (b) Atas barang-barang jaminan kredit yang diikat secara fidusia dilakukan dengan cara mengajukan *revindicatioir beslag* melalui prosedur gugatan ke PN. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah dan menghindarkan tindakan yang mungkin dilakukan oleh debitur misalnya penggelapan, penjualan dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai atau harga barang jaminan; (c) *Conservatoir beslag* terhadap seluruh harta kekayaan debitur /

penanggung jawab baik yang diikat maupun yang belum / tidak diikat; (d) Mengajukan gugatan sebagai perkara perdata biasa, apabila barang jaminan belum mempunyai bukti kepemilikan yang sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani dengan hak tanggungan.

## **B. Implikasi**

Adapun konsekuensi logis dari kesimpulan diatas antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa banyak kredit bermasalah / macet ( *non performing loan* ) yang terjadi di BRI Cabang Temanggung, akan dapat mempengaruhi likuiditas bank tersebut, dan yang dapat mengakibatkan tersendatnya program pemerintah untuk memberikan / menyalurkan kredit, khususnya kredit lunak ( *loan credit* ) kepada masyarakat di daerah Temanggung guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pada umumnya.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kredit macet tersebut tidak segera dievaluasi dan dianalisa secara saksama oleh bank dalam pemberian kredit yang akan datang, maka kemungkinan kredit macet / bermasalah akan semakin besar jumlahnya. Hal ini dapat saja terjadi jika dikaitkan dengan adanya kebijakan-kebijakan dasar yang dibuat oleh Pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM dan situasi politik yang tidak kondusif.

## **C. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas maka penulis memberikan saran-saran berupa rekomendasi guna mengatasi permasalahan yang dikaji, antara lain :

- a. Diperlukannya ketelitian, sikap kehati-hatian dan penerapan prinsip-prinsip kesehatan Bank dalam penyaluran kredit oleh petugas Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung di waktu mendatang.
- b. Melakukan analisis dan evaluasi yang mendalam mengenai kelayakan suatu permohonan kredit yang diajukan, baik dalam menganalisis prospek hasil produksi, dan kemampuan debitur dalam mengelola manajemen perusahaannya.
- c. Menghindarkan dan menghitung secara cermat, antara nilai jaminan dengan jumlah kredit yang diajukan, sehingga dapat dihindarkan obyek jaminan tidak dapat lekas terjual karena lokasi, terlalu tinggi nilainya mengingat bahwa yang dapat disalurkan adalah berupa dana segar ( *cash flow* )
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam manajemen Bank, baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mengantisipasi meluasnya / dan besarnya nilai kredit yang disalurkan diwaktu mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Ali, Masyhud, 2002, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka, Jakarta.
- Dedi Sumardi, 1982, *Sumber-sumber Hukum Positif*, Bandung, Alumni.
- Djumhana, Muhamad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Esmi Warasih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang, Suryandaru.
- Gatot Supramono, SH., 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.
- HB. Soetopo, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- Hasan, Djuhaendah, 1999, *Makalah Seminar; Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan Di Indonesia*.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi )*, Mandar Maju, Bandung.
- Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan ang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, 2001, *dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2003, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Perbankan Modern ( Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998 )*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 1999, *Makalah Seminar; Hukum Perbankan Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi*.
- , 1999, *Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni; Bandung.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Remy Sjahdeini. ST., 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.
- , 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soebekti. R. R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Tujuh ( Edisi Revisi ), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soebekti, 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1979. *Persektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. PT. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Hanityo Ronny, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.



Sutojo, Siswanto, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta.

Suyatno, Thomas, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.

Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta.

Wardoyo, Gatot, 1992, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta.

Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Karunika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, Kolektibilitas Penggolongan Kredit Bagi Bank Umum

Surat Edaran BI Nomor 25 /1/BPPP jo SK Direksi BI Nomor 25 / 97/Kep /DIR

Surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) Nomor: 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva.

Surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) Nomor: 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif.